

BAB I**PENDAHULUAN****I.1. Latar Belakang**

PKS adalah sebuah fenomena yang paling menarik dalam politik kontemporer.¹ Sejak kelahirannya, ia sering menarik perhatian pengamat dan masyarakat luas baik melalui berbagai kegiatan sosialnya yang simpatik, maupun dalam praktik politiknya. Begitu menarik karena PKS juga menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam yang hampir tidak pernah ada dalam sejarah politik Indonesia²

Ada beberapa hal penting dan saling berhubungan yang perlu disebutkan dalam menganalisa pendekatan baru itu. *Pertama*, PKS mengambil sumber inspirasi ideologi dan organisasi utamanya dari luar dan menjadikan pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model acuan.³ Namun, ini bukan berarti bahwa PKS bagian dari Ikhwan Muslimin atau instrumen pengaplikasian pemikiran Hasan Al Banna. PKS bukan perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin dalam bentuk struktural, tapi PKS terkena imbas dari riak Ikhwanul Muslimin. Dan memang tak bisa dinafikan kalau pemikiran Hasan Al Banna yang pernah diterapkan pada Ikhwanul Muslimin menjadi inspirasi bagi para aktivis PKS.⁴

¹ Greg Fealy dalam pengantar Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung : Harakatuna Publishing, 2005, hal.v

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Furkon, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004, hal.285

Kedua, PKS adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini.⁵ Hal ini terbukti hanya PKS lah yang memiliki perangkat kaderisasi yang detil, kompleks dan berjenjang. Perangkat utama kaderisasinya bernama halaqoh.⁶ Secara garis besar yang disampaikan dalam halaqah-halaqah yang diselenggarakan oleh gerakan dakwah ini menekankan kepada dua pengelompokan besar, pertama; pembentukan karakter pribadi-pribadi Islam (*takwin asy syakhshiyah al islamiyyah*) dan kedua; pembentukan karakter gerakan atau aktivis gerakan (*takwin asy syakhshiyah harookiyah/as daa'iyah*). Penjabaran dari dua tema besar tersebut melahirkan banyak kajian turunan yang kemudian melahirkan perubahan-perubahan, baik pada level individu maupun perubahan pada level kolektif.⁷

Ketiga, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial yang luas dan efektif.⁸ Bukti di antaranya adalah tentang ribuan kader PK(S) mendirikan posko banjir di Jakarta (Suara Merdeka, 1 Februari 2002), aksi sosial membersihkan kota dan menanam pohon di pinggir jalan kota Bogor (Radar Bogor, 22 Maret 1999), aksi PK(S) membeli 40 ton gabah petani di Semarang dalam Gerakan Nasional Peduli Petani (Suara Merdeka, 30 Juni 2003), bahkan PK(S) juga membentuk posko kemanusiaan tragedi bom Bali dengan mengadakan donor darah, pemberian bantuan, sekaligus menjadi sarana melakukan komunikasi dan kerja sama baik antara warga muslim dengan non muslim khususnya Hindu.

⁵ Fealy, *op.cit.* hal.vi

⁶ Halaqah adalah kajian rutin yang beranggotakan 5 – 12 orang dengan seorang pembimbing (*murobbi*)

⁷ Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta : Teraju, 2002, hal.110

⁸ Fealy, *op.cit.* hal.vi

juga antara warga pendatang di Bali dengan warga asli Bali (*Keadilan Online*, 16 Oktober 2002).⁹

Keempat, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan publik sebagai program utama politik.¹⁰ Sikap yang paling menonjol dalam hal ini adalah kesantunan anggota PKS dan sikap tegas kadernya menolak korupsi. Dalam editorialnya, *Media Indonesia* mengomentari unjuk rasa sejuta umat yang dilakukan berkali-kali oleh Partai Keadilan (PK)--sebelum berubah jadi PKS--yang berlangsung dengan tertib dan damai bahwa ada faktor yang menyebabkannya, yaitu faktor pemimpin. Hanya komunitas dengan pemimpin yang memiliki visi dan disiplin sosial yang tinggi yang akan menghasilkan pengikut yang juga taat kepada tata tertib.¹¹

Lebih dari itu, dalam tataran politik praktis, PKS menurut Airlangga Pribadi, bahkan mematahkan tesis dominan dalam politik Indonesia yang memprediksikan terjadinya jalan buntu masa depan Islam politik di Indonesia. Menurutnya, diskursus yang dominan di kalangan akademisi melihat Islam politik sebagai sesuatu yang statis, beku dan tidak dinamis. Apabila tesis Liddle tentang pemilahan Islam politik dalam kerangka oposisi biner diametrikal: substansialis-skripturalis, Islam kultural-Islam politik, Inklusivitas-Eksklusivitas, digunakan. Terhadap PKS, menurut Airlangga, dengan mudah dikategorikan sebagai kelompok eksklusif-skripturalistik. Akan tetapi dalam kasus ini, Airlangga menilai tidaklah sesederhana itu. Ia mengatakan bahwa kategorisasi sederhana yang terbatas tersebut, memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengelaborasi bahwa,

⁹ *Mengapa Memilih PK Sejahtera*. Jakarta: M-PWC, cetakan ketiga, 2003.

¹⁰ Fealy, *op.cit.*, hal.vii

¹¹ *Ibid.*, hal. 70-72.

walaupun PKS terlibat aktif dalam gemuruh atmosfer politik identitas Islam pasca kepemimpinan Soeharto, hal ini tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera terjebak semata-mata pada pengedepanan agenda politik simbolik, yang berifat eksklusif dan komunalistik (tipikalisasi yang sering dialamatkan oleh kalangan akademisi terhadap kekuatan Islam politik).¹²

Ternyata kategorisasi yang salah ini pun diakui oleh Liddle¹³. Ia mengatakan bahwa partai Islam yang paling berhasil adalah PKS, yang secara ideologis bersifat sekaligus skripturalis dan substansialis. Hal ini pulalah, menurutnya, meruntuhkan kategorisasi masyarakat Islam yang pernah ia lakukan.

Didi Turmuzi memiliki penilaian yang serupa. Didi mengatakan bahwa meski terdapat warna keislaman dalam *performance* PKS, namun Islam yang ditampilkan tidak berada dalam sisi ideologis, namun lebih mengimplementasikan Islam sebagai perilaku, sehingga *performance* PKS berbeda dengan partai Islam lainnya¹⁴.

Fenomena PKS tentu saja tidak bisa dilihat hanya dari fenomena kontemporeranya saja. Namun harus pula ditelusuri serangkaian latar sejarah kelahiran dan perkembangannya. Berkaitan dengan fenomena PKS, Penulis menemukan sebuah periodeisasi yang menggambarkan serangkaian perubahan praktik politik PKS dalam beberapa periode yang berbeda.

Dalam periodeisasi ini terdapat empat periode. Periode pertama, antara tahun 1970-1998 yaitu periode gerakan ekstraparlementer. Dalam periode ini hubungan

¹² Lihat opini Airlangga Pribadi, *PKS: Lintasan Baru Islam Politik* dalam *Republika*, 10 Juli 2004

¹³ Lihat opini R. William Liddle, *Islam, Nasionalis, dan Empati*, dalam *Kompas*, Kamis, 22 Juli 2004.

¹⁴ Turmuzi, Didi, *Rekonfigurasi Politik Indonesia Dalam Pemilu 2004*, *Pikiran Rakyat*, 10 April 2004

umat Islam dengan Pemerintah (Orde Baru) diwarnai dengan pasang surut. R. William Liddle menyebutkan bahwa akhir 1960-an sampai pertengahan tahun 1980-an merupakan masa yang sangat berat bagi umat Islam, dalam posisinya sebagai kambing hitam terdusurnya berbagai peristiwa di tingkat nasional.¹⁵ Perlakuan pemerintah Orde Baru terhadap Politik Islam diandaikan oleh M. Natsir seperti halnya perlakuan terhadap kucing kurap. *"They have treated us like cats with ringworm"*¹⁶

Sikap diskriminatif pemerintah terhadap kekuatan politik Islam bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali partai-partai dan ormas-ormas Islam menentang dengan keras kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang sangat merugikan umat Islam. Setidaknya ada tiga kebijakan yang ditentang keras yaitu fusi parpol dalam tiga parpol, asas tunggal Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebuah catatan yang penting dikemukakan di sini, kalangan Islam politik tidak satu format dalam menghadapi kediktatoran Orde Baru. Sebagian dari elemen Islam Politik menghadapi rezim Orde Baru melalui perlawanan yang bersifat manifes. Dalam hal ini, dikembangkan berbagai model koreksi dan kontrol terhadap jalannya kekuasaan melalui cara-cara yang terbuka dan artikulasi terusterang. Upaya balik yang diberlakukan rezim Orde Baru adalah penguatan represi. Sebagian yang lain dari elemen Islam politik menghadapi rezim Orde Baru melalui jalan perlawanan yang bercorak latensi. Seperti halnya elemen yang pertama,

¹⁵ Furkon. *Op.cit.*, hal. 113

¹⁶ Ali, Fachry, "Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia", dalam Nasrulloh Ali Fauzi, ICMI : *Antara Status Quo dan Demokratisasi*, dalam Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hal. 3

elemen kedua ini menolak diktatorial rezim Orde Baru. Hanya saja mereka tak mengembangkan bentuk-bentuk kritik yang terbuka.¹⁷

Periode kedua, antara tahun 1998-2003, yaitu periode gerakan intraparlementer. Terbukanya kran kebebasan politik yang ditandai dengan dicabutnya paket UU politik produk Orde Baru tidak disia-siakan oleh gerakan Tarbiyah. Maka pada 20 Juli 1998 gerakan Tarbiyah bemetamorfosis menjadi partai politik bernama Partai Keadilan (PK) yang dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta yang dihadiri oleh 50.000 massa¹⁸. Untuk sekelas partai yang baru berdiri, kemampuan menggalang massa sebanyak itu tentu merupakan hal yang luar biasa.

Periode selanjutnya, antara tahun 2003-2004 yaitu periode pengokohan gerakan intraparlementer. Untuk meghadapi ganjalan yang muncul dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Partai Politik (Parpol), Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan (DPP PK) menyiapkan partai alternatif. Partai baru itu bernama Partai Keadilan (PK) Sejahtera. Strategi yang dilakukan bukanlah membuat prartai baru namun menggabungkan PK dan PKS. Perubahan ini nampaknya dibarengi oleh perubahan strategi. Slogan yang diperjuangkan PKS beralih ke isu-isu populis, tidak lagi membawa slogan ideologis. Di antara slogan populis itu adalah kampanye bebas korupsi. Dalam upaya menarik simpati masyarakat, PKS semakin menggiatkan kegiatan sosial yang selama ini sering dilakukan PK. Bahkan untuk mengoptimalkan kegiatan ini dibentuklah badan-badan sejenis badan semi otonom seperti P2B (Pos

¹⁷ Furkon, *Op.cit.* hal.115-116

¹⁸ www.pk-sejahtera.or.id

Penanggulangan Bencana). Dalam kampanye Pemilu 2004 PKS hampir-hampir tidak sedikitpun menyentuh isu ideologis. Jargon andalan yang mampu menarik simpati banyak pemilih justru jargon yang menggambarkan keunikan dan sumbangsih PKS selama ini yaitu "Bersih dan Peduli"

Bermodal citra positif itu PKS secara fantastis meraup suara yang cukup signifikan. Dengan jumlah delapan juta suara, berarti PKS mengalami kenaikan suara sebanyak tujuh kali lipat. Dengan perolehan suara itu, PKS memantapkan diri dalam jajaran *The Big Five*. Hadirnya PKS sebagai salah satu dari tiga partai fenomenal—selain PD dan PDS—dalam Pemilu legislatif 2004 menarik para pengamat politik untuk menganalisa atau sekedar melakukan sebuah klasifikasi.

Aribowo misalnya, mengklasifikasikan partai-partai peserta Pemilu 2004 dalam tiga model parpol. *Pertama*, model PKS, yaitu model pembangunan Institusi (MPI). Untuk membangun institusinya selama lima tahun, PKS tidak henti-hentinya mengembangkan jaringan dan komunikasi secara intens. PKS secara institusional telah menarik perbedaan image masyarakat. PKS adalah parpol yang berbeda dengan parpol yang lain yang semakin hari semakin terpuruk opininya di masyarakat luas. Selain itu, PKS mampu mengontrol anggota legislatifnya dari berbagai isu KKN, main uang dan mabuk fasilitas.

Tiga hal yang mampu ditarik PKS untuk mengembangkan institusi parpol, yaitu menarik image masyarakat bahwa anggota legislatif PKS bersih, mengembangkan opini masyarakat bahwa PKS adalah parpol yang santun, konsisten, tertib, intelektual dan bersih, menimbulkan citra politik luar biasa bahwa PKS adalah partai lain, partai beda. Syamsudin Haris menambahkan, PKS juga

tidak pernah mengusung negara berdasar syariat Islam, seperti yang diusung PPP dan PBB. Yang lebih diingat masyarakat adalah kader PKS selalu muncul dalam berbagai musibah yang dialami masyarakat, mulai banjir, kebakaran, maupun kasus demam berdarah. Itu yang membuat PKS lebih diterima publik.¹⁹

Model kedua, model jaringan agama (MJA). MJA dilakukan sepenuhnya oleh PDS. PDS sangat sensitif mengembangkan jaringan pemilih melalui lembaga agama. Jaringan agama yang solid itulah yang membesarkan PDS. Meski mereka tak kampanye secara hura-hura dan besar seperti parpol lama. Kampanye PDS kecil-kecil, intensif di DP kabupaten / kota dan menggunakan jaringan. Menurut Syamsudin Haris, munculnya PDS tidak bisa dilepaskan dari kelahiran PKS yang notabene juga berbasis aktivis dan kelompok Islam. Untuk mengimbangi PKS, lahirlah PDS yang banyak dihuni kaum nasrani.

Model ketiga, model tokoh (MT). PD hanya bertumpu pada ketokohan SBY. Dia selama jadi Menkopolkam menunjukkan sosok yang berfikir jernih, simpati, tidak kasar tidak menghujat, menghindari kontroversial, menghindari penggunaan kata-kata kasar dan menyerang seseorang atau kelompok. Tetapi tegas mengambil keputusan. SBY dengan demikian merupakan pribadi yang cocok bagi sebagian besar masyarakat yang kecewa terhadap rejim yang ada.²⁰

Khusus untuk fenomena PD dan PKS, menurut Sukardi Sinarkit, Direktur Eksekutif Soeng Sarjadi Syndicated (SSS), besarnya perolehan kedua partai itu merupakan *blunder politik* partai-partai elite penguasa. Mereka secara tidak sadar telah memberikan kesan bahwa kedua partai ini seolah menjadi posisi korban

¹⁹ Jawa Pos, Rabu, 7 April 2004.

²⁰ Lihat opini Aribowo, *Tiga Model Parpol yang Mengejutkan*, dalam Jawa Pos, Senin, 26 April 2004.

kekuasaan. Namun lebih dari itu, kedua partai tersebut memang mampu melakukan komunikasi politik dengan menjual partainya kepada masyarakat.²¹ Muhammad Asfar memiliki pendapat yang agak berbeda, menurutnya pilihan pada partai ketiga tersebut (PD dan PKS) harus dimaknai sebagai suatu bentuk protes atas buruknya kinerja partai penguasa (PDIP) dan partai oposisi (semisal Partai Golkar).²²

Periode terakhir, antara tahun 2004-2006 yaitu periode *The Ruling Party*. Pasca Pemilu legislatif pada awalnya PKS akan berkonsentrasi dalam perjuangan politik di parlemen, dengan mengawasi jalannya pemerintahan agar bisa berlangsung secara bersih. Oleh sebab itu melalui Musyawarah Majelis Syuro pada hari Minggu 25 April 2004 memutuskan untuk tidak mengajukan kader partai sebagai capres atau pun cawapres, oleh banyak pihak sikap ini dipandang sebagai sikap kenegarawanan dari Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu, PK Sejahtera merintis koalisi umat untuk menghasilkan capres dan cawapres dari umat yang akan didukung bersama secara "all out".²³

Dalam periode ini diawali dengan keterlibatan PKS dalam Pilpres 2004. Di Pilpres putaran pertama 5 Juli 2004 lalu, PKS memberikan dukungannya kepada pasangan M. Amien Rais – Siswono Yudhohusodo. Dukungan ini kurang maksimal karena baru diumumkan beberapa hari saja menjelang pencoblokan. Dalam putaran pertama ini, pasangan Amin - Siswono hanya menduduki peringkat keempat dari lima pasangan yang bersaing.

²¹ Jawa Pos, Selasa, 6 April 2004.

²² Lihat opini Asfar, Muhammad, *Jengkel pada Partai Penguasa dan Oposisi*, dalam Jawa Pos, Rabu, 7 April 2004.

²³ www.kompas.com, Minggu 25 April 2004

Pemilu Presiden putaran kedua 20 September 2004 menyisakan dua pasangan yaitu Susilo Bambang Yudhohusodo – M. Yusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi. Di putaran kedua ini sejumlah aspek menjadi bahan pertimbangan PKS dalam memilih pasangan capres antara lain kemampuan dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, sikap terhadap militerisme, independensi terhadap pengaruh asing, perhatian terhadap ekonomi kerakyatan, serta sikap proporsional terhadap isu terorisme.²⁴ Setelah SBY menyatakan bahwa dirinya dan PKS akan bersatu dalam *platform* bersama yang telah dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang juga ia tandatangani di hari yang sama, PKS akhirnya memantapkan diri mendukung SBY – MJK.²⁵

Dukungan ini bukan berarti tanpa tentangan. Di Surabaya misalnya, Barisan Oposisi Bersatu (BOB) Jawa Timur mengemukakan keras dukungan PKS tersebut. Mereka bahkan mensinyalir bahwa PKS telah disusupi militer ini berarti PKS tak konsisten, karena kepemimpinan sipil itulah yang seharusnya lebih didukung daripada militer²⁶

Di Jakarta bahkan kampanye negatif ditemukan tersebar dalam bentuk spanduk yang bertuliskan, "*Kami Warga PKS Jakarta Menolak Capres Militer, Karena Reformasi adalah Gerakan Sipil Bersatu*". Spanduk-spanduk itu juga tampak seragam di seluruh wilayah yang menandakan hal itu telah disiapkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba memecah belah kader dan simpatisan PKS.²⁷

²⁴ www.kompas.com, Rabu, 18 Agustus 2004.

²⁵ www.kompas.com, Kamis 26 Agustus 2004.

²⁶ www.kompas.com, Minggu, 5 September 2004.

²⁷ www.kompas.com, Minggu, 19 September 2004

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kemenangan SBY-JK dalam Pilpres putaran kedua membawa konsekuensi keterlibatan PKS dalam pemerintahan baru. Tiga dari empat menteri yang diusulkan PKS ternyata disetujui dan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, yang diumumkan pada hari Rabu 20 Oktober 2004 malam. Ketiga menteri yang diusulkan PKS dan masuk jajaran kabinet tersebut adalah Adyaksa Dault sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), M Yusuf Asyari sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), dan Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian. Satu nama lagi yang diusulkan PKS namun tidak masuk dalam jajaran kabinet adalah Suripto, yang diusulkan sebagai Jaksa Agung. Meskipun begitu, secara umum PKS dalam posisi kritis dan objektif dalam melihat kinerja Kabinet Indonesia Bersatu ke depan, dengan tetap mengusung slogan 'bersih dan peduli'.²⁸

Dalam perjalanannya, ternyata Majelis Syuro PKS harus berulang kali membahas kelanjutan koalisinya. Hal ini terkait dengan memburuknya kinerja pemerintahan SBY-Kalla yang ditandai oleh beberapa kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan harga BBM dan impor beras. Namun begitu, berkali-kali pula PKS tidak mewujudkan niatnya menarik dukungan terhadap SBY-Kalla.

Dari pemaparan mengenai praktik politik PKS di atas, menjadi penting bagi Penulis untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi praktik politiknya dari periode satu ke periode lainnya. Juga untuk mencari jawaban tentang apakah

²⁸ www.kompas.com, Kamis, 21 Oktober 2004.

berbagai perubahan praktik politik yang dilakukan PKS berpedoman pada ideologi dan strategi politiknya?

I.2. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas timbul beberapa pertanyaan penting yaitu :

1. Bagaimanakah perubahan bentuk praksis politik PKS dari periode satu ke periode selanjutnya ?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi praksis politik PKS dari satu periode ke periode selanjutnya ?
3. Apakah bentuk praksis politik PKS bersesuaian dengan prinsip dan strategi politik yang dimiliki ?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban, menjelaskan dan mendeskripsikan beberapa hal antara lain :

1. Menjelaskan perubahan bentuk praksis politik PKS dari periode satu ke periode selanjutnya.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praksis politik PKS dari satu periode ke periode selanjutnya
3. Menjelaskan apakah bentuk praksis politik PKS bersesuaian dengan prinsip dan strategi politik yang dimiliki.

I.4. Kerangka Teori

Sebagai pisau analisis, penulis akan menggunakan beberapa teori yang relevan bagi penelitian ini yaitu (a) teori tentang demokratisasi dan partisipasi politik; (b) teori tentang gerakan kebangkitan (revivalis) Islam; dan (c) teori tentang partai politik.

I.4.1. Demokratisasi dan Partisipasi Politik

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Ini mencakup hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat.²⁹

Demokratisasi dengan demikian, mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik yang dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya kontrol dengan kekerasan, tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktek administratif), atau diperluas sehingga mencakup mereka yang sebelumnya tidak ikut menikmati hak dan kewajiban (misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritas, dan warga negara asing), atau diperluas sehingga meliputi isu-isu dan lembaga-lembaga yang semula tidak menjadi wilayah partisipasi masyarakat (misalnya, badan-badan pemerintahan,

²⁹ O'Donnell Guillermo dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta : LP3ES, 1993, hal.8

jajaran militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasi kepentingan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya.³⁰

Fenomena demokratisasi tidak terbatas pada wilayah tertentu saja di beberapa belahan dunia. Tapi, merupakan tuntutan terhadap pemberdayaan rakyat dalam pemerintahan dan politik yang semakin marak diserukan oleh rakyat di seluruh dunia.³¹

Dalam menjelaskan fenomena gelombang demokratisasi ketiga yang menjalar dari Eropa selatan menuju Amerika Latin, Asia, dan negara-negara komunis yang berlangsung sejak dasawarsa 1970, Huntington berpendapat bahwa terdapat beberapa macam perubahan yang berperan penting dalam melahirkan transisi gelombang ketiga ini, antara lain

(1) Semakin mendalamnya masalah-masalah legitimasi yang dihadapi oleh sistem-sistem otoriter di dunia di mana nilai-nilai demokrasi telah diterima oleh banyak orang, tergantung rezim-rezim itu pada legitimasi kinerja, dan melemahnya legitimasi itu akibat kekalahan perang, kegagalan ekonomi, dan "kejutan minyak" pada tahun 1973-1974 dan 1976-1979.

(2) Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa pada tahun 1960-an, yang telah mengakibatkan meningkatnya standar hidup, taraf pendidikan, dan sangat membesarnya kelas menengah kota di banyak negeri.

(3) "Efek bola salju" atau efek demonstrasi dari transisi-transisi awal menuju demokrasi pada gelombang ketiga, yang diperkuat oleh sarana komunikasi

³⁰ *Ibid.*, hal. 9-10.

³¹ Esposito, John L. dan Voll, John O., *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999, hal.14

internasional, dalam merangsang dan menyediakan model bagi upaya mengubah rezim di negeri-negeri lain selanjutnya.³²

Kondisi-kondisi Pendukung

Namun demokratisasi sebagai sebuah proses yang berlangsung di sebuah kawasan tidaklah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan kondisi tertentu. Demokratisasi tentu saja membutuhkan kondisi-kondisi yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Untuk menjelaskan hal ini, Sorensen menyebutkan beberapa prakondisi bagi berkembangnya demokrasi. Yang pertama ia menyebutkan bahwa modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi : meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan mass media.

Prakondisi kedua seringkali dikemukakan dalam upaya menentukan faktor-faktor yang mendukung demokrasi mengenai budaya politik-yaitu, sistem nilai dan keyakinan yang menjelaskan konteks dan makna dari tindakan politik. Sorensen menganggap bahwa terdapat budaya-budaya tertentu yang mendukung tumbuhnya demokrasi, namun apa pula budaya-budaya yang justru menghambat tumbuhnya demokrasi. Ia menganggap bahwa Protestantisme mendukung demokrasi, sementara Katolisisme dalam banyak kasus terutama di Amerika Latin, menghambat demokrasi. Dalam hal ini, menurut Sorensen, Islam dan Konfusianisme mirip dengan Katolisisme.

³² Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 56-57.

Prakondisi ketiga yang menguntungkan bagi demokrasi adalah struktur sosial masyarakat, yaitu, kelas dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Goran Therborn, demokrasi “selalu dan di mana-mana” muncul dalam perjuangan masyarakat melawan dominasi kaum borjuis.

Prakondisi terakhir di sini adalah faktor-faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, politik dan elemen-elemen lain yang merupakan konteks internasional dari proses yang terjadi di suatu negara. Adalah hal yang lumrah di kalangan teoritis modernisasi untuk menganggap bahwa pengaruh tersebut bermanfaat untuk mengembangkan demokrasi. Teoritis Dependensi menarik kesimpulan yang bertolak belakang : Ketimpangan dan distorsi ekonomi dan masyarakat di Dunia Ketiga, yang disebabkan oleh ketergantungannya dalam sistem ekonomi dunia, membuat demokrasi sangat sulit diwujudkan.³³

Demokrasi sebagai sebuah budaya bukanlah bersifat *given* bagi masyarakat lingkungannya. Demokrasi tumbuh akibat perjuangan yang dilakukan oleh para individu atau masyarakat yang mendukungnya. Huntington mengatakan bahwa demokrasi bukan diciptakan oleh faktor penyebab non-manusia, melainkan oleh faktor manusia. Para pemimpin politik dan publik harus bertindak.³⁴

Pada sebagian besar kasus, transisi menuju demokrasi di dasarkan pada negosiasi dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung rezim otoriter.³⁵ Perundingan dan kompromi di antara elit-elit politik merupakan faktor yang paling menentukan dalam demokratisasi.³⁶

³³ Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal 42-46

³⁴ Huntington, *Op.cit.* hal.130

³⁵ Sorensen, *Op.cit.* hal. 49

³⁶ Huntington, *Op.cit.* hal.212

Suatu kompromi penting pada sebagian besar kasus demokratisasi barangkali adalah “tawar-menawar demokratis (*the democratic bargain*)”, yakni penyeimbang antara partisipasi dengan pemoderatan. Secara implisit atau eksplisit dalam proses-proses perundingan yang mengarah ke demokratisasi, ruang lingkup partisipasi diperluas dan lebih banyak sosok politik dan kelompok memperoleh kesempatan berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan memenangkan kekuasaan berdasarkan kesepakatan yang implisit atau eksplisit bahwa mereka akan bersikap moderat dalam taktik dan kebijakan mereka.³⁷

Dalam negosiasi, motif bagi kelompok yang tidak memiliki hak-hak istimewa, yaitu mereka yang terhalang dari pengaruh politik pada masa pemerintahan otoriter, berjuang untuk negara demokrasi yang akan memberikan akses atas pengaruh politik kepada mereka. Sedangkan bagi kelompok dominan, terdapat beberapa alasan mengapa mereka melakukan negosiasi. Alasan pertama adalah karena adanya perpecahan dalam koalisi kekuatan-kekuatan di belakang pemerintah otoriter, perpecahan antara garis keras dan garis lunak dalam permulaan demokrasi (*democratic opening*). Alasan yang lebih pragmatis untuk gerakan semacam itu berkenaan dengan masalah-masalah yang dapat dipecahkan dengan demokrasi.

Przeworski menarik kesimpulan bahwa demokratisasi hanya dimungkinkan “jika terdapat lembaga yang memberikan harapan yang masuk akal bahwa kepentingan kekuatan-kekuatan politik besar tidak akan dirugikan dalam kompetisi demokrasi, dengan risorsis yang dikumpulkan oleh mereka”. Dengan kata lain,

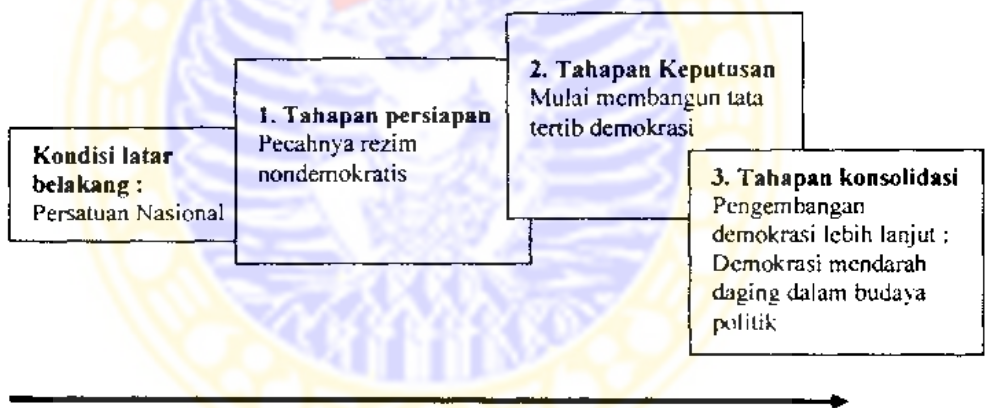
³⁷ *Ibid.*, hal.217

kelompok elit akan mendukung demokrasi hanya jika mereka merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan tercapai dalam kondisi yang lebih demokratis.³⁸

Salah satu alat demokratisasi adalah pemilihan umum yang dapat digunakan untuk mengakhiri rejim otoriter namun juga dapat digunakan untuk memperbarui legitimasi mereka. Dengan sedikit sekali perkecualian, partai-partai atau calon-calon yang berkaitan dengan rezim otoriter mengalami kekalahan atau berprestasi buruk dalam pemilihan umum yang disponsori rezim itu.³⁹

Tahapan-tahapan Demokrasi

Tahapan dalam transisi menuju demokrasi digambarkan dengan model sederhana yang merupakan versi modifikasi dari model yang dibuat oleh Dankwart Rustow sebagaimana yang dikutip Sorensen berikut ini.⁴⁰



Gambar 1 : Tahapan dalam Proses Transisi Demokrasi

Model tersebut mempunyai satu kondisi latar belakang, persatuan nasional, yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami transisi menuju

³⁸ Sorensen hal. 49-51.

³⁹ Huntington, h.224

⁴⁰ Sorensen, *Op.cit.*, hal.75.

demokrasi. Menurut Rustow, persatuan nasional secara sederhana memperlihatkan bahwa “sebagian besar penduduk dalam dari warga negara ...tidak mempunyai keraguan dan keberatan mental mengenai komunitas politiknya.”⁴¹ Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat yang mengancam persatuan nasional sebelum masuk ke tahap pertama dalam proses transisi demokrasi.

Tahapan pertama dalam transisi menuju demokrasi adalah tahap persiapan (*preparatory phase*). Tahapan ini berisi apa yang pada awalnya disebut Rustow sebagai perjuangan politik yang panjang dan tidak meyakinkan. Demokrasi mungkin bukan menjadi tujuan utama mereka, demokrasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan lain atau dampak ikutan dari perjuangan mencapai tujuan lainnya, seperti masyarakat yang lebih setara, distribusi kesejahteraan yang lebih baik, perluasan hak-hak dan kebebasan, dan sebagainya.

Tahapan kedua, adalah *tahapan keputusan*, yang berisi “sebuah keputusan yang dirundingkan oleh sebagian dari para pemimpin politik untuk....melembagakan beberapa aspek krusial dari prosedur demokrasi”. Jika periode waktunya sangat singkat, kekuatan oposisi mempunyai sedikit peluang untuk mengorganisaikan dirinya untuk menentukan aktor yang sesuai dalam arena politik. Mungkin faktor terpenting yang mempengaruhi hasil dari tahapan keputusan adalah membangun koalisi utama yang berada di balik transisi.

Tahapan keempat adalah tahapan konsolidasi. Konsolidasi tidak akan tercapai sebelum lembaga demokrasi terbentuk dan demokrasi yang baru

⁴¹ *Ibid*, hal 72

membuktikan dirinya mampu mengalihkan kekuasaan kepada partai oposisi, demokrasi tersebut harus terbukti mampu menghadapi tantangan-tantangan yang paling berat. Dapat dikatakan bahwa konsolidasi bukanlah sebuah proses politik murni tetapi proses yang menuntut perubahan sosial dan ekonomi. Tahap terakhir konsolidasi adalah proses di mana lembaga dan praktek demokrasi mendarah daging dalam budaya politik.⁴²

Partisipasi Politik

Pada gilirannya, demokratisasi kemudian berdampak pada meluasnya kesempatan partisipasi politik warga negara. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan ekonomi warga negara, maka meningkat pula tingkat kesadaran politik yang dimilikinya.

Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Beberapa aspek dari definsi inti ini perlu dicatat.

Pertama, ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. *Kedua*, yang diperhatikan adalah kegiatan politik warga negara preman, atau lebih tepat lagi, perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman. *Ketiga*, yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. *Keempat*,

⁴² *Ibid*, hal.73-81.

definisi ini mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tidak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek itu.⁴³

Dalam teori, kecenderungan perorangan-perorangan dan kelompok-kelompok untuk berusaha mempengaruhi pemerintah ditentukan oleh adanya cara-cara alternatif yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Apabila cara-cara non-politik memberikan harapan yang sama besar atau lebih besar, dibandingkan dengan saluran-saluran politik, maka dapat diperkirakan bahwa orang-orang akan menginvestasikan waktu dan energi mereka sesuai dengan itu.⁴⁴

Bentuk-bentuk Partisipasi

Huntington-Nelson membedakan bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut

(a) Kegiatan Pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

(b) Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

(c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

⁴³ Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan M, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 6.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 22.

(d) Mencari koneksi (*connection*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

(e) Tindak kekerasan (*violence*) yaitu upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.⁴⁵

Di dalam masyarakat yang berlainan, partisipasi politik dapat berakar dalam landasan-landasan golongan yang berlainan. Oleh sebab itu, maka adalah mungkin untuk menganalisa partisipasi dari segi tipe-tipe organisasi kolektif yang berlainan yang digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi dan yang biasanya merupakan landasan yang lazim adalah :

- (a) Kelas : perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa;
- (b) Kelompok / komunal : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama;
- (c) Lingkungan (*Neighborhood*) : perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain;
- (d) Partai : perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan; dan

⁴⁵ *Ibid.*, hal.16-18

(e) Golongan (*faction*) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.⁴⁶

1.4.2. Gerakan Kebangkitan (*Revivalis*) Islam

Sebab-sebab muncul gerakan kebangkitan

Dampak demokratisasi yang terjadi di negara-negara otoriter yang berdampak pada meningkatnya tuntutan terhadap partisipasi dan pemberdayaan rakyat diiringi pula dengan meningkatnya tuntutan lain yaitu tuntutan terhadap pengakuan identitas khusus atau komunitas-komunitas asli.⁴⁷

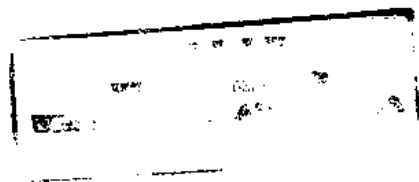
Di dunia Muslim, telah muncul kebangkitan Islam yang penting dan sangat jelas terlihat. Penguatan iman dan identitas ini mempunyai pengaruh hebat dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang tercermin dalam pakaian, perubahan gaya hidup sosial, kesenian, dan, paling jelas terlihat, dalam arena dan kekuasaan politik. Bersamaan dengan munculnya kebangkitan Islam, muncul pula tuntutan yang semakin kuat terhadap partisipasi rakyat dalam sistem politik.⁴⁸

Indek bangkitnya Islam dalam kehidupan pribadi banyak: perhatian yang makin besar pada ibadah (mengunjungi masjid, shalat, puasa), memperbanyak program serta publikasi agama, lebih menekankan pakaian dan nilai-nilai Islam,

⁴⁶ *Ibid.* h. 21.

⁴⁷ Esposito-Voll, *Op.cit.* hal.16.

⁴⁸ *Ibid.* hal.17



serta revitalisasi tasawuf. Pembaharuan yang lebih luas ini juga disertai penegasan kembali Islam dalam kehidupan umum: bertambahnya pemerintahan, organisasi, hukum, bank, lembaga keajahteraan sosial, dan lembaga pendidikan yang berorientasikan Islam.⁴⁹ Senada dengan Dekmejian, bahwa kebangkitan Islam terjadi dalam beberapa bentuk. Pada tingkat yang paling umum, kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam.⁵⁰

Esposito beranggapan bahwa di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem yang lebih demokratis.⁵¹ Gerakan kebangkitan agama (dalam hal ini Islam, *pen*) ditandai dengan semakin tingginya kesadaran dalam berpartisipasi dalam wilayah politik.

Mengenai penyebab lahirnya gerakan-gerakan Islam, Dekmejian memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, hubungan kausal antara krisis sosial dan kebangkitan keagamaan memiliki validitas yang substansial dalam latar belakang budaya yang beraneka ragam.⁵² Ia menyebutkan bahwa kondisi-kondisi krisis yang melatarbelakangi gerakan kebangkitan Islam adalah konflik identitas, krisis legitimasi, konflik politik, konflik kelas, krisis ekonomi, krisis budaya, dan kemandulan kekuatan militer, yang bertindak sebagai katalisator dari respon *revivalis Islam*.⁵³

⁴⁹ Esposito, John L. *Islam Kontemporer : Reformasi atau Revolusi ?*, Bandung : Mizam, 1995, hal.22.

⁵⁰ Dekmejian, R. Hrair, *Kebangkitan Islam : Katalisator, Kategori dan Konsekuensi* dalam Hunter, Shireen T., *Politik Kebangkitan Islam (terj)*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2001, hal.3

⁵¹ Esposito, *Op.cit.* hal. 1

⁵² Dekmejian, *Op.cit.* hal 5

⁵³ *Ibid.*, hal.8

Validitas dari faktor-faktor krisis ini diperkuat oleh pandangan diri dan pandangan dunia dari banyak umat Islam, terutama kalangan revivalis. Pandangan yang disebut terakhir tentang kondisi Islam adalah pandangan tentang kesuraman dan mala petaka yang ditandai oleh kemerosotan internal, sekularisasi, ketidakadilan ekonomi, penindasan politik dan kekalahan militer. Salah satu akibat utama dari kemerosotan Islam adalah krisis identitas baik individual maupun kolektif di kalangan kaum umat Islam. Tugas untuk menemukan pengganti kerangka identitas akan terbukti sulit karena Islam merupakan sistem sosial yang meliputi agama (*din*), negara (*daulah*) dan hukum (*syari'ah*).

Beberapa ciri krisis yang paling menonjol dewasa ini adalah (1) *pervasif*—kondisi krisis ini tidak terbatas pada negara-negara tertentu, namun meresap di seluruh dunia Islam; (2) *Komprehensif*—krisis-krisis itu meliputi berbagai bidang sekaligus: sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, psikologi, dan spiritual; (3) *kumulatif*—krisis ini bersifat kumulatif, menggambarkan puncak kegagalan upaya pembangunan bangsa, pembangunan sosial-ekonomi dan keperkasaan militer; (4) *Xenophobisme*, kebencian terhadap orang asing. Dalam pandangan para intelektual revivalis, integritas kebudayaan Islam dan *way of life* Islam itu juga terancam oleh kekuatan-kekuatan non-Islam seperti sekularisme dan modernitas, yang didorong oleh pemerintah Islam.⁵⁴

Bentuk-bentuk Kebangkitan Islam

Bentuk-bentuk kebangkitan Islam beraneka ragam dan hampir tak terbatas dari satu negara ke negara lainnya. Namun, ada tema-tema yang jelas: perasaan

⁵⁴ *Ibid.* hal 9-13

bahwa sistem-sitem politik, ekonomi dan sosial yang ada telah gagal; ketidaksukaan dan kadang-kadang penolakan terhadap barat; pencarian identitas dan keotentikan yamh lebih jelas; dan keyakinan bahwa Islam memberikan ideologi yang memadai bagi negara dan masyarakatm suatu alternatif yang sah untuk menggantikan nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme sekuler.⁵⁵

Berbagai kepentingan politik gerakan-gerakan Islam itu mendorong mereka untuk menjadi oposisi revolusioner terhadap pemerintah, atau berpartisipasi dalam sistem politik yang ada sebagai gerakan oposisi. Dalam sejumlah kasus, gerakan Islam menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi kekuatan yang berkuasa dalam sistem politik. Spektrum yang luas ini dapat dikategorikan dalam empat posisi umum yang di dalamnya kebangkitan Islam dan demokratisasi saling berhubungan. Keempat posisi gerakan Islam itu adalah (1) oposisi revolusioner terhadap sistem politik yang ada; (2) oposisi yang diakui atau bekerja sama dan beroperasi dalam sistem politik yang ada; (3) berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui aliansi atau koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik lain, dan (4) kekuatan kontrol dalam sistem politik yang ada.⁵⁶

Di tahun '90-an kebangkitan Islam tidak lagi terbatas pada organisasi-organisasi kecil dari bagian yang tidak penting dalam masyarakat, tetapi telah menjadi bagian dari masyarakat Muslim yang menghasilkan kelas baru kaum elite yang berpendidikan modern tetapi berorientasi Islam yang bekerja sama dan kadang-kadang berkoalisi dengan mitra-mitra mereka yang sekuler. Kebangkitan terus berkembang menjadi gerakan sosio-religius yang luas, yang kini berfungsi di

⁵⁵ Esposito, *Op cit.* hal.24

⁵⁶ Esposito-Voll, *Op cit.* hal. 40

setiap negara Islam dan transnasional. Gerakan itu merupakan gerakan yang mempunyai banyak segi yang memberikan dampak utama kebangkitan Islam di masa mendatang. Tujuannya adalah transformasi masyarakat melalui pembentukan individu-individu Islam. Masyarakat dakwah bekerja di bidang jasa sosial (rumah sakit, klinik, bantuan hukum), dalam proyek-proyek ekonomi (bank Islam, rumah investasi, perusahaan asuransi), dalam bidang pendidikan (sekolah, pusat perawatan anak, perkemahan pemuda), dan dalam penerbitan serta penyiaran. Program umum mereka diarahkan baik kepada para pemuda maupun orang tua.⁵⁷

Prinsip-prinsip Revivalis Islam

Berbagai upaya perlawanan yang dilakukan oleh kalangan revivalis terhadap berbagai macam faktor yang mengancam eksistensi Islam dilandaskan pada prinsip-prinsip yang tentu saja secara tegas bertolak belakang dengan prinsip-prinsip sekulerisme. Prinsip-prinsip ideologis kalangan revivalis Islam kontemporer tersebut antara lain:

1. *Din wa al-Daulah*. Islam merupakan sistem kehidupan yang total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu dan tempat. Pemisahan antara agama (*din*) dan negara (*daulah*) tidak dapat diterima. Hukum syari'ah dalam Islam bersifat *inheren*. Al Qur'an memberikan syari'ah dan negara menegakkannya.
2. *Al-Qur'am dam al-Sunnah*. Fondasi Islam adalah Al-Qur'am dan al-Sunnah—Hadits Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Umat Islam diperintahkan

⁵⁷ Esposito, *Op.cit.* hal. 33.

untuk kembali pada akar-akar Islam yang awal dan praktek-praktek umat nabi yang puritan dalam mencari keaslian dan pembaruan.

3. *Puritanisme dan Keadilan Sosial.* Nilai-nilai dan adat istiadat budaya Barat ditolak sebagai sesuatu yang asing bagi Islam. Pada akhirnya media massa diperintahkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan praktek-praktek Islam daripada menyebarkan pengaruh-pengaruh budaya asing. Kembali pada jalan yang benar juga mensyaratkan penegakan keadilan sosial-ekonomi. Semua harta kekayaan menjadi milik masyarakat dan akhirnya menjadi milik Tuhan; manusia hanya memanfaatkan kekayaan yang didapat melalui usahanya. Islam mengakui hak-hak milik pribadi, namun membatasinya sesuai dengan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. *Kedaulatan dan Hukum Allah berdasarkan Syari'ah.* Tujuan pokok dari umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi—Nizam al Islam—di mana syari'ah merupakan undang-undang tertinggi.

5. *Jihad : Pilar Keenam.* Muslim yang baik diperintahkan untuk menjalankan Rukun Islam Lima dan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan berkomitmen untuk bertindak membangun masyarakat yang ideal sesuai dengan syari'ah. Untuk membangun masyarakat yang demikian diperlukan adanya usaha untuk menghancurkan kehidupan *jahiliyah*—masyarakat pra-Islam yang kafir—dan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan duniawi mereka melalui jihad. Upaya jihad tidak untuk “bertahan”, tujuan jihad adalah menaklukkan semua halangan yang mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh dunia, yang meliputi

negara, sistem sosial dan tradisi-tradisi asing, di mana mujahidin akan melakukan jihad yang "komprehensif" termasuk menggunakan kekerasan.⁵⁸

Kategorisasi ideologi

Prinsip-prinsip ideologis di atas secara umum diyakini oleh berbagai kelompok revivalis Islam. Namun dari sekian banyak kelompok revivalis Islam itu terdapat beberapa perbedaan secara ideologis yang nantinya sangat berpengaruh terhadap bentuk tindakan mereka. Setidaknya terdapat empat kategori ideologi revivalis yang dapat diidentifikasi:

1. Gradualis Adaptasionis.

Kelompok ini mencoba bergerak pada skala yang besar dalam batas-batas legalitas seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena menyadari bahaya-bahaya yang menyertai konfrontasi revolusioner dengan para penguasa, gerakan-gerakan ini mengikuti kebijakan bertahap untuk mempertinggi kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat, sementara terus berupaya mendorong pelaksanaan syari'ah oleh negara. Dalam upaya mereka untuk menegakkan tatanan Islam pada akhirnya, kelompok-kelompok ini menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan untuk mengadaptasikan ideologi-ideologi dan program-program mereka dengan kondisi modern.

2. Syiah Revolusioner

Terdapat beberapa varian dari pemikiran revolusioner Syiah, yang paling penting dari pemikiran ini adalah varian dari Republik Islam Iran. Dalam bentuknya yang sangat kontras dengan ideologi politik Ali Syari'ati dan

⁵⁸ Dekmejian. *Op.cit.* hal. 14-15.

Mujahidin-e-Khalq, doktrin resmi Republik Islam ini didasarkan pada konsep Wilayah al-Faqih Ayatullah Khomeini—perwalian dari ahli hukum. Pengikut-pengikut lain dari varian ideologi Syiah Khomeinis antara lain Hisb al Dakwah al-Islamiyya dari Irak dan gerakan yang berafiliasi padanya di negara-negara Teluk, dan Hizbullah, Jihad al-Islam, dan AMAL Islam di Libanon Selatan.

3. Sunni Revolusioner

Akar-akar ideologis dan gerakan revivalis Sunni kontemporer dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan beberapa aktivis teoritis yang penting, terutama Ibn Hanbal (w. 855), Ibn Hazm (w.1064), Nawawi (w.1277), Ibn Taimiyah (w.1328), Ibn Qayim (w.1350), Ibnu Katsir (w.1373), dan Ibnu Abd al=Wahhab (w.1792). Imam-imam itu seringkali disebut-sebut oleh para ideolog Sunni revolusioner dewasa ini karena komitmen mereka terhadap pembaruan umat dengan kembali pada akar-akar Islam, advokasi militansi dan jihad dalam mempertahankan Islam, perpaduan dari ideologi revivalis dengan aktivisme sosial dan politik dalam kehidupan perorangan mereka; dan kesiapan untuk menghadapi otoritas keagamaan dan politik serta kesediaan untuk menderita demi mempertahankan keyakinan keagamaan mereka.

4. Mesianis Primitif

Bentuk ideologi revivalis yang paling puritan adalah ideologi gerakan mesianis yang muncul secara periodik dalam sejarah Islam. Gerakan ideologi gerakan mahdi ditandai oleh sikap puritanisme yang ketat dan primitivisme—berusaha untuk mencontoh kehidupan Nabi dan bentuk kehidupan komunitas Islam pertama. Jadi, para pemimpin gerakan mahdi berusaha menciptakan kembali

umat Nabi dan menentang inovasi (pembaruan) atau usaha-usaha untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi modern.⁵⁹

1.4.3. Partai Politik

Dalam sistem demokrasi, eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara.⁶⁰ Walaupun begitu, menurut Macridis, partai merupakan konsekuensi dan bukan ‘penyebab’ demokrasi, tetapi sekali mereka muncul, mereka memperkuat kondisi-kondisi sebelumnya, yakni kelangsungan demokrasi.⁶¹

Seorang sarjana bernama Sigmund Deumann—sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo—memberikan definisi partai politik sebagai berikut :

“ Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.”⁶²

Fungsi Partai Politik

Fungsi-fungsi partai politik banyak dipaparkan oleh para ahli politik dalam bermacam versi. Namun secara umum fungsi-fungsi tersebut terdiri dari

⁵⁹ *Ibid.*, hal.16-19

⁶⁰ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 15

⁶¹ Macridis, Roy C., *Pengantar Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai*, dalam Ikhlusun Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Yogyakarta : Tiara Wacana, edisi revisi 1996, hal.22.

⁶² Budiarjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah pengantar dalam Miriam Budiarjo (Peny.), Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Gramedia, 1982, 14.

representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.⁶³

Fungsi representasi adalah ekspresi dan artikulasi kepentingan di dalam dan melalui partai. Kadang-kadang fungsi representasi lebih sering ditampilkan daripada fungsi perantara (brokerage), yaitu partai merupakan ekspresi kepentingan tertentu, kelas tertentu atau kelompok sosial tertentu.⁶⁴ Sedangkan artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-*input*-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.⁶⁵ Sebelum menjalankan artikulasi politiknya, partai politik harus terlebih dahulu menjalankan fungsi komunikasi politik yang dimilikinya. Fungsi ini dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia yakni mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.⁶⁶ Kedudukan partai dalam arus informasi dalam suatu negara yang bersifat dua arah adalah sebagai jembatan antara "mereka yang memerintah" (*the ruler*) dengan "mereka yang diperintah" (*the ruled*).⁶⁷

Fungsi berikutnya adalah konversi dan agregasi. Keduanya adalah varian dari representasi dan perantara. Dengan konversi kita mengerti transformasi dari apa yang disebut bahan-bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan

⁶³ Macridis, *op.cit.* hal.26.

⁶⁴ *Ibid.* hal .26

⁶⁵ Koirudin. *Op.cit.* hal.86.

⁶⁶ *Ibid.* hal. 103

⁶⁷ Budiarjo. *Op.cit.* hal.14

menjadi kebijaksanaan dan keputusan. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang berhasil akan tergantung pada keseimbangan yang tepat antara bahan yang dimasukkan (intake) dan yang dikeluarkan (out put).⁶⁸ Sedangkan agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.⁶⁹

Integrasi memiliki varian-varian fungsi seperti sosialisasi, mobilisasi dan partisipasi. Sosialisasi adalah proses, di mana kumpulan norma-norma sistem politik ditransformasikan (ditularkan) kepada orang-orang yang lebih muda;⁷⁰ Melalui kursus-kursus pendidikan partai menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Terutama dalam negara berkembang, yang bangsanya sering heterogen sifatnya, partai politik dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.⁷¹ Fungsi ini sangat diharapkan karena negara-negara baru sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.⁷² Fungsi pengintegrasian ini dapat pula disepadankan dengan fungsi sebagai pengatur konflik.

Fungsi mobilisasi yang dimiliki partai politik adalah variasi ekstrem dari sosialisasi, yaitu partai berusaha memasukkan secara cepat sejumlah orang yang sebelumnya berada di luar sistem tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu-menahu, tidak tertarik, atau takut, ke dalam sistem itu untuk menanamkan

⁶⁸ Macridis, *Op.cit.* hal. 26.

⁶⁹ Koirudin, *Op.cit.* hal 91

⁷⁰ Macridis, *Op.cit.* hal. 27.

⁷¹ Budiarjo, *Op.cit.* hal. 16

⁷² Budiarjo, *Ibid.* hal. 20.

kepentingan dan menjamin dukungan massa. Sedangkan fungsi partisipasi berdiri di antara mobilisasi dan sosialisasi.⁷³ Herbert McClosky, seperti yang dikutip Miriam Budiarmo, mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁷⁴

Fungsi persuasi yang dilakukan oleh partai politik adalah kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan-kegiatan tersebut.⁷⁵ Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik memanfaatkan berbagai macam media komunikasi untuk mempengaruhi masyarakat secara luas.

Bertolak belakang dengan fungsi di atas adalah fungsi represi. Dalam melakukan represi, partai, melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota, mengendalikan nasib semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara yang tidak hanya tidak mengizinkan adanya oposisi tetapi juga menghukum pihak oposisi yang membangkang.⁷⁶

Fungsi penting lainnya adalah rekrutmen. Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus ia merupakan salah satu cara untuk menyeleksi

⁷³ Macridis, *Op.cit.*, hal. 27.

⁷⁴ Budiarmo, *Op.cit.*, hal.1

⁷⁵ Macridis, *Op.cit.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 27-28

calon-calon pemimpin.⁷⁷ Oleh karena itu rekrutmen juga dimaknai sebagai latihan (training) dan persiapan untuk kepemimpinan; terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintah atau fungsi-fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetisi yang baik adalah pemilihan.⁷⁸ Rekrutmen politik ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran/ pergantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.⁷⁹

Fungsi lainnya adalah pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah. Anggota partai mencapai persetujuan tentang tujuan-tujuan utama partai, dan sebelum itu mereka mempunyai kesempatan untuk memperdebatkan tujuan-tujuan tersebut.⁸⁰

Fungsi dukungan yang dijalankan oleh partai politik dilakukan dengan menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem di mana partai tersebut beroperasi. Tidak ada partai yang dapat hidup untuk waktu yang lama tanpa adanya usaha menanamkan pola kepercayaan di kalangan rakyat yang bisa mendukungnya dan kelangsungan sistem politik secara keseluruhan.⁸¹

⁷⁷ Budiarjo, *Op.cit.*, hal. 16

⁷⁸ Macridis, *Op.cit.*, hal. 28

⁷⁹ Koirudin, *Op.cit.*, hal 101.

⁸⁰ Macridis, *Op.cit.*, hal. 28

⁸¹ *Ibid.*, hal. 29

Jenis dan Tipologi Partai Politik

Dari berbagai bentuk dan jenis partai politik yang ada, terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil. Maurice Duverger menawarkan perbedaannya menjadi partai elit atau partai tradisional (*partis de cadre*) dan partai massa (*partis de masses*). Dan satu bentuk lain yang terletak di antara keduanya, yaitu partai “tak langsung” (*indirect parties*).⁸²

Di Eropa, partai-partai elit tidak bertujuan untuk mendapatkan anggota yang sebanyak mungkin, tetapi mereka lebih menekankan pada mendapatkan dukungan dari orang-orang terkemuka, mereka lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Warga negara yang terkemuka itu dicari atau karena prestise mereka, yang akan memberkahi partai itu dengan pengaruh moral tertentu, atau karena kekayaan orang tersebut, yang akan memungkinkan partai tersebut mendapat bantuan dalam biaya-biaya untuk berkampanye. Organisasinya bersifat lentur, struktur organisasinya juga memiliki otonomi yang cukup besar. Oleh karena desentralisasi ini, maka organisasi pusat partai politik tersebut boleh dikatakan tidak mempunyai kekuasaan apapun.⁸³

Partai massa seperti partai buruh di Jerman dan Prancis berusaha untuk mendapatkan anggota sebanyak mungkin, yaitu anggota parlemen untuk partai yang akan membayar iuran setiap tahun ataupun setiap bulan. Uang ini akan membantu pembiayaan kampanye. Karena mereka tidak dapat membiayai partai melalui iuran ataupun kontribusi yang besar dari warga daerah yang terkemuka—sebagaimana dilakukan partai tradisional. Mereka tidak mau calon partai dipilih

⁸² Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan (terj)*, Yogyakarta : Bina Aksara, 1984, hal. 6.

⁸³ *Ibid.*, hal. 6-7

oleh orang-orang dalam dari komite yang kecil, maka suatu perwakilan dari para anggota diorganisir secara demokratis, pada kongres-kongres partai lokal atau kongres partai nasional, untuk memilih dan menyaring calon-calon dan untuk mengarahkan kebijakan partai.⁸⁴

Di antara dua tipe partai ini terdapat partai tipe tengah (*Intermediate*). Ada dua jenis organisasi *intermediate* yaitu partai-partai tak langsung dan partai-partai yang terdapat di negara berkembang. Kedua-duanya sebenarnya lebih mendekati partai massa dari pada partai tradisional.

Partai tak langsung dengan mengambil Partai Buruh Inggris sebagai contoh. Partai ini tidak mengusahakan adanya keanggotaan yang reguler. Komite utamanya dibentuk dari perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang setuju untuk mengambil tindakan yang sama yang menyangkut isu-isu politik. Komite ini memilih calon-calon untuk pemilihan dan mengontrol keuangan kampanye yang telah dibentuk untuk tujuan tersebut melalui kontribusi dari setiap kelompok.

Di negara-negara yang sedang berkembang, pada partai-partai massa jarak sosial antara para anggota dalam "lingkaran inti"⁸⁵ dan yang lainnya sangat besar. Struktur partai politik pada umumnya mencerminkan struktur dari daerah atau negara itu sendiri pada tingkat perkembangannya saat itu.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*, h.11

⁸⁵ Pada semua partai massa para pemimpinnya membentuk suatu kelompok yang cukup berbeda dari anggota-anggota partai yang lain dan dari para militan partai itu: 'orang dalam' (*inner circle*) ini sedikit banyak menyerupai kepemimpinan partai tradisional yang seakan-akan menyelip di tengah-tengah jantung partai massa tersebut. Namun garis yang memisahkan kedua kelompok itu tidaklah kaku.

⁸⁶ Maurice, *Op cit.* hal. 18-21.

Ada juga perbedaan yang dilakukan oleh Macridis yang didasarkan pada:

(a) sumber dukungan partai; (b) organisasi internal; (c) fungsi yang dilakukan dan cara-cara tindakannya (*mode of action*).

(a) *Sumber-sumber dukungan partai* : Disarankan satu perbedaan dasar: komprehensif lawan sektarian. Yang termasuk komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*), yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Partai-partai sektarian adalah partai-partai yang memakai kelas, daerah (*region*) atau ideologi sebagai daya tariknya.

(b) *Organisasi Internal*: Dua tipe dasar yang diajukan adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaan terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (*persyaratan*) yang ketat untuk keanggotaannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak sama sekali bagi keanggotaannya. Partai-partai tertutup cenderung menjadi otoriter, yaitu para anggota diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh para pemimpin tanpa memiliki kemudahan akses terhadap prosedur pertimbangan yang terbuka; kebalikannya adalah partai terbuka. Partai-partai tertutup cenderung menekankan aksi langsung dan diarahkan terhadap kontrol monopolistik pemerintah; partai-partai terbuka menekankan aksi politik dan menghormati pluralisme politik.

(c) *Cara-cara bertindak dan fungsi*: Dua tipe dasar yang kita ajukan, adalah *diffused* (menyebar) dan *specialized* (khusus). Partai yang terspesialisasi menekankan ke-perwakilan-an (*representativeness*), agregasi, pertimbangan dan

perumusan kebijaksanaan, partisipasi, serta kontrol pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu; sedangkan partai yang *diffused* (menyebar) menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Mengenai cara-cara tindakannya, partai yang *diffused* pada umumnya akan menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa, sedangkan partai yang terspesialisasi akan membatasi tipe aksi mereka kepada prosedur-prosedur yang dapat diterima.⁸⁷

Koirudin membagi partai-partai dalam lima jenis. *Pertama*, jenis partai proto. Partai jenis ini merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol, yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau intraparlemen. Basis dukungannya adalah kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif rendah (sederhana). Belum sepenuhnya sebagaimana dalam ciri parpol modern. Ciri faksional masih menonjol, dan ciri yang jelas adalah pembedaan antara kelompok anggota dan non-anggota.

Kedua, jenis partai kader. Secara historis partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas. Anggotanya kebanyakan kelas menengah ke atas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologinya rendah sebab aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.

Ketiga, jenis partai massa. Berkembangnya jenis ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat. Orientasi parpol ini adalah kepada basis pendukung,

⁸⁷ Macridis, *Op cit.* hal. 30

yaitu buruh, petani dan massa lainnya. Tujuannya adalah untuk pendidikan politik dan pemenangan pemilu. Ideologi dan organisasinya rapi.

Keempat, jenis partai diktatorial. Partai jenis ini merupakan subtype partai massa. Ideologinya kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi melakukan kontrol ketat. Rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana anggota parpol dituntut mengabdikan secara total.

Kelima, jenis partai *catch-all*. Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-banyaknya menjadi anggotanya. Tujuannya memenangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelompok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak terlalu kaku.⁸⁸

Lebih lanjut Koirudin melakukan tipologi berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan asas dan orientasi, parpol diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu parpol pragmatis, parpol doktriner dan parpol kepentingan. Yang dimaksud dengan parpol pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Parpol pragmatis, biasanya muncul dalam sistem dua partai berkompetisi yang relatif stabil. Parpol doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang

⁸⁸ Koirudin, *Op.cit.*, hal.78-80

dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.⁸⁹

Selain itu, Almond, sebagaimana yang dikutip Koirudin, menggolongkan parpol berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu *pertama*, parpol yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah; *kedua*, parpol yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha; *ketiga*, parpol yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katholik, Protestan, dan Hindu; dan *keempat*, parpol yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.⁹⁰

Partai politik yang berorientasi keagamaan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori: komunal, berdasarkan sekte (madzab), tradisional, dan modern. Dua macam partai tersebut pertama berfungsi dalam masyarakat yang ditandai dengan kompetisi antar umat atau antar sekte keagamaan, dan persaingan inilah yang menjadi orientasi pokok dari partai tersebut. Perbedaan ideologi digunakan untuk mengklasifikasikan partai keagamaan yang berperan dalam masyarakat yang tidak mengalami konflik antar umat maupun sekte keagamaan, dan ini bisa berbentuk partai "tradisional" atau partai "modern".

Partai komunal muncul sebagai tanggapan terhadap adanya konflik laten dalam masyarakat dengan kemajemukan agamanya. Alasan utama yang

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 81-82

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 83

mendukung keberadaan partai kumunal ini sudah barang tentu adalah perlindungan terhadap kepentingan komunal (umat) masing-masing; ia bisa bervariasi dari tingkat yang sam sekali tradisional sampai ke tingkat progresif moderat dalam menanggapi masalah yang berkaitan dengan interpretasi agama masing-masing.

Partai politik yang dilandasi oleh (keyakinan) sekte memiliki kelemahan yang paling besar yaitu terletak pada usaha mereka mencari anggota melalui perantara pemimpin agama, jadi menyerahkan alat-alat partisipasi politik modern ke tangan kelompok dan tokoh tradisoal.

Partai tradisional terikat pada keinginan untuk mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai dan lembaga leagamaan dalam masyarakat. Perjuangan partai untuk memperoleh kekuasaan politik dilandasi dengan pandangan sistem religiopolitik iséal dari masa lampau. Beberapa diantara sekian partai tradisional tersebut dibentuk dan dikendalikan oleh tokoh fungsionaris agama, tetapi secara resmi anggotanya berasal baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan awam. Partai-partai ulama seperti itu lahir dari kandungan perhimpunan ulama.⁹¹

Sedangkan untuk memberi gambaran tentang partai modern, Smith mencontohkan Partai masyumi di Indonesia. Landasan ideologi Masyumi bersumber pada tokoh modernis Muslim Muhammad Abduh pada awal abad ke-20.⁹²

⁹¹ Smith, Donald Eugene, *Agama dan Modernisasi Politik*. Jakarta : CV. Rajawali, 1988, hal. 180-183

⁹² *Ibid.*, hal. 182.

I.5. Metode Penelitian

I.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bentuk-bentuk praksis politik PKS dalam periodeisasi yang telah dibuat. Pengambilan metode kualitatif ini dengan pertimbangan, *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹³

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian peneliti menganalisa data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.⁹⁴

I.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau bahan pustaka sebab data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini dicari dalam dokumen atau bahab

⁹³ Molcong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1998, hal.5

⁹⁴ *Ibid.* hal.6

pustaka.⁹⁵ Teknik ini disebut juga teknik pengumpulan data studi dokumen dan bahan pustaka.atau disebut dengan sumber sekunder yaitu informasi yang pada mulanya dikumpulkan untuk suatu tujuan lain daripada dimaksudkan sebagai pengetahuan ilmiah.⁹⁶

Penulis memilih teknik pengumpulan data sumber sekunder dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik yang dimilikinya yaitu pertama data yang Penulis butuhkan telah siap dibuat (*ready-made*) tanpa terlebih dahulu membuat koisioner, melakukan wawancara dan pengamatan.. Kedua, informasi tentang tema tulisan ini sudah tersedia di berbagai media massa, buku dan dokumen-dokumen. Ketiga, sumber data sekunder yang dibutuhkan tidak dibatasi ruang dan waktu.⁹⁷ Penulis dapat mengambil data yang ada di ruang dan waktu yang berbeda.

Keuntungan menggunakan sumber data sekunder ini yang juga menjadi pertimbangan bagi penulis antara lain adalah, pertama, menghemat waktu dan uang. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis tidak perlu hadir langsung bersama narasumber di tempat dan waktu tertentu yang sering kali banyak membutuhkan banyak waktu dan uang. Kedua, memperluas dasar dari mana generalisasi ilmiah bisa dibuat. Ketiga, dapat digunakan untuk menguji temuan-temuan yang sudah di dapat dalam penelitian primer oleh peneliti.⁹⁸

Sumber data sekunder yang digunakan Penulis antara lain buku yang membahas tentang PKS yang ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, selain itu

⁹⁵ Rianto, Adi dan Heru Prasadja, *Langkah-langkah Penelitian Sosial*, Jakarta: Arcan, 1993, hal.48

⁹⁶ Black, James A dan Champion, Dean J., *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung : Eresco, 1992, hal. 348.

⁹⁷ *Ibid*.

⁹⁸ *Ibid*, hal 359.

juga dari media massa, dokumen dan literatur-literatur yang sesuai yang ditulis oleh para tokoh PKS yang penulis anggap representatif dalam hal pemikiran, pandangan dan strategi dakwah PKS.

I.5.3. Teknik Pemilihan Sumber Data Sekunder

Karena Penulis menggunakan teknik sumber data sekunder maka ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sumber-sumber data sekunder tersebut. Pertama, untuk buku atau hasil penelitian yang digunakan adalah buku yang menjadikan PKS sebagai objek kajian baik dalam bentuk skripsi atau tesis.

Untuk media massa, Penulis memilih dua media massa nasional sebagai sumber utama yaitu Kompas dan Gatra. Masing-masing diakses melalui situsnya, www.kompas.com dan www.gatra.com. Dua media tersebut Penulis pandang cukup representatif karena memiliki kualitas pemberitaan yang berbobot. Dua media ini ditunjang oleh media lain seperti Republika, Suara Merdeka dan Jawa Pos.

Untuk menyeimbangkan informasi yang diperoleh, Penulis juga mengambil data dari majalah Saksi yang selama ini mempresentasikan sikap dan pandangan PKS. Dari majalah tersebut diperoleh beberapa hasil wawancara dengan tokoh-tokoh PKS terkait dengan sikap dan kebijakan yang mereka keluarkan. Tidak ketinggalan pula data dari situs resmi PKS yaitu www.pk-sejahtera.or.id serta dokumen-dokumen yang diterbitkan secara luas oleh DPP PKS.

I.5.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian bertipe kualitatif ini adalah teknik analisa domain (*domain analysis*). Teknik ini diambil dengan tujuan eksplorasi. Artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.⁹⁹ Karena Penulis akan meneliti hubungan POS dan artikulasi politik PKS serta perubahan politik identitasnya, maka Penulis menggunakan model hubungan semantik sebab-akibat (*Cause-Effect*) dan Rasional (*Rationale*).

Dengan metode analisis ini, setelah Penulis memilih pola hubungan semantik sebab-akibat dan rasional, kemudian menyiapkan lembaran kerja Teknik Analisis Domain, memilah-milah data sehingga terlihat kesamaan tertentu yang dikelompokkan dalam kategori/jenis tertentu. Dari hasil pemil data tersebut, dicari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolik dari suatu domain yang sesuai dengan hubungan-hubungan semantik.¹⁰⁰

I.5.5. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data-data sekunder Penulis dapat mengaksesnya dari berbagai sumber data yang ditentukan dari Surabaya.

⁹⁹ Bungin, Burhan, *Teknik-teknik Kualitatif dalam Penelitian Sosial dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : RT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal.85.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 88.

BAB II**PROFIL PK DAN PKS****II.1. Profil PK****II.1.1. Latar Belakang Berdirinya**

Partai Keadilan didirikan di Jakarta pada hari Ahad, 15 Rabi'ul Tsani 1419 atau 9 Agustus 1998. Dalam Piagam Deklarasi Partai Keadilan yang ditandatangani oleh De. H. M. Hidayat Nurwahid, MA sebagai Ketua Dewan Pendiri dan H. Luthfi Hasan Ishaq, MA sebagai Sekretaris disebutkan bahwa didirikannya Partai Keadilan adalah untuk mewujudkan cita-cita sejati Proklamasi, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan dan persatuan.¹⁰¹

Partai Keadilan memandang bahwa Kejayaan atau kehancuran suatu negeri merupakan buah dari kepatuhan atau keingkaran penduduknya terhadap nilai-nilai religius dan universal, terutama nilai keadilan. Pada titik ini fitrah insani bertemu dengan tuntutan reformasi dan peluang demokratisasi. Maka perjuangan mengakkan keadilan pun menjadi keharusan, sebagai manifestasi misi utama Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam

Sedangkan dalam manifesto politiknya, PK menetapkan dirinya sebagai partai kader yang mendasarkan seluruh aktivitasnya kepada cara pandang menyeluruh dalam mereformasi kehidupan social, politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan budaya.¹⁰²

¹⁰¹ *Sekilas Partai Keadilan*. Diterbitkan oleh Sekretariat DPP Partai Keadilan. 1998, hal 2.

² *Ibid*, hal. 10

Berikut nama-nama anggota dewan pendiri yang turut serta dalam pendirian Partai Keadilan :

1. Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA.
2. Dr. Mulyanto, MEng
3. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, MSc.
4. Drs. H. Abu Ridho, A.S.
5. H. Mutammimul Ula, SH.
6. KH. Abdul Hasib, Lc
7. Fahri Hamzah, SE
8. Dr. H. Daud Rasyid Sitorus, MA
9. Drs. Mukhlis Abdi
10. Dr. Agus Nurhadi
11. Igo Ilham, Ak
12. Chin Kun Min (al-Hafidz)
13. Drs. Arifianto
14. Nursanita Nasution, SE, MS
15. H. Rahmat Abdullah
16. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
17. R. H. Untung Wahono
18. Mashadi
19. H. Abdu Mallu, SE, MBA
20. H. M. Nasir Sain, MA
21. KH. Acep Abdus Syukur

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

22. Dr. H. Ahzami Samiun Jazuli, MA
23. KH. Yusuf Suspendi, Lc
24. Hj. Yoyoh Yusroh
25. H. M. Anis Matta, Lc
26. Dra. Zirlirosa Jamil
27. Drs. H. Suharna S, MT
28. H.M. Ihsan Arlansyah Tanjung
29. Syamsul Balda, SE, MM
30. H. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi
31. Sunmanjaya Rukmandis
32. Ahmad Heriawan, Lc
33. Drs. Erlangga Masdiana, Msi
34. Didik Akhmadi, Ak, MCom
35. Ir. H. Suswono
36. Ahmad Zainuddin, Lc
37. KH. Abdur Roqib, Lc
38. H. Abdullah Said Baharmus, Lc
39. H. Ahmad Hatta, MA, PhD
40. H. Makmur Hasanuddin, MA
41. Dra. Hj. Siti Zainab
42. Dra. Sri Utami
43. Nurmansyah Lubis, SE, Ak, MM
44. dr. H. Naharus Surur

45. Drs. Muhroni
46. H. Aus Hidayat
47. Ir. H. Tifatul Sembiring
48. Drs. Almuzammil Yusuf
49. H. M. Tizar Zein
50. H. Fahmy Alaydrus, Psy¹⁰³

II.1.2. Karakteristik

Sebagai sebuah lembaga politik, Partai Keadilan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan partai yang lain. Karakteristik itu antara lain (1) *Moralis*. Partai Keadilan berupaya menjadikan moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam ini sebagai basis serta keteladanan. Pertimbangan moral akan selalu menjadi tonggak dalam program dan aktivitas yang digulirkan. (2) *Profesional*. Profesionalitas yang bercirikan pada penguasaan detail masalah akan mengantarkan partai pada kebijakan-kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pembentukan sikap kritis dan sensitivitas karenanya sangat sitekankan dalam aktivitas partai. (3) *Patriotik*. Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan. Sedangkan partai merupakan salah satu sarana dakwah yang bertujuan menegakkan nilai-nilai islam di bumi. Bagi para kader partai berjuang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan umumnya.

¹⁰³ Ibid, hal. 3-4

(4) *Domokrat*. Kedudukan pemerintahan dalam sebuah negara menurut pandangan Islam diselenggarakan atas dasar prinsip kedaulatan rakyat untuk merealisasikan kedaulatan Ilahi. (5) *Reformis*. Partai keadilan menyadari bahwa tugas pembangunan adalah salah satu misinya yang paling utama. Ia akan tetap menempatkan posisinya sebagai reformis serta konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu segala bentuk tiranik yang telah terbukti menjadi sumber kerusakan di dunia harus dihapuskan. (6) *Independen*. Partai keadilan yang telah menyatakan jati dirinya sebagai partai dakwah yang tetap berada pada posisi kemerdekaan (independensi). Ia adalah sebuah partai yang independen dalam pengertian yang sebenarnya.¹⁰⁴

II.1.3. Prinsip dasar

Sebagai dasar dan titik tolak yang memuat cita-cita normatif, sekaligus juga merupakan kristalisasi keyakinan atas realitas historis dan harapan masa depan bagi bangsa Indonesia, Partai Keadilan menetapkan beberapa prinsip dasar. Prinsip *pertama* adalah keadilan, persamaan, keseimbangan. Partai keadilan akan berusaha keras menegakkan keadilan dan keseimbangan antara perlakuan terhadap manusia dan pengakuan terhadap keberadaan serta hak-hak politik dan sosialnya terutama dalam kepemimpinan. Sebab, pemimpin yang zalim tidak patut ditaati atau diikuti karena kezhaliman yang dilakukannya memupus fungsi kepemimpinannya.

¹⁰⁴ Ibid, hal. 27-39

Prinsip kedua, Kesatuan nasional. Partai keadilan akan tetap konsern menjaga dan mempertahankan integritas negara Indonesia sebagai bagian dari Dunia Islam agar dapat berperan mewujudkan peradaban dunia melalui upaya memelihara persatuan nasional. *Prinsip ketiga*, Kemajuan. Partai keadilan meyakini bahwa kemajuan dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sesuatu yang aksiomatik dan harus diwujudkan. *Prinsip keempat*, Khidmatul ummah demi Persatuan. Partai Keadilan berupaya memposisikan dirinya sebagai garda utama khidmatul ummah demi terwujudnya cita-cita persatuan umat. Untuk mewujudkan itu pembinaan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara adalah jalan yang harus ditempuh. Persatuan umat yang hakiki harus dibangun di atas landasan pemahaman dan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Fenomena banyaknya kelompok, organisasi atau partai adalah sebuah fenomena proses yang tumbuh secara positif sebagai akibat kehancuran umat. Oleh karena itu, langkah-langkah *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling menolong), dan *takuful* (saling menanggung) harus digalakkan di antara kelompok, organisasi atau partai tersebut guna melahirkan titik-titik persatuan yang lebih besar.

Prinsip kelima, Kerjasama Internasional. Partai Keadilan merasa perlu untuk berusaha sekuat tenaga mendorong upaya tersebut dalam rangka menandakan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, mengakui hak bangsa-bangsa dalam kehidupan bersama yang saling menghormati, saling bekerja sama untuk meningkatkan kemajuan, pertumbuhan dan pemakmuran bumi yang dilandasi rasa keadilan. Tegasnya partai

keadilan menginginkan terciptanya sebuah tata dunia baru yang saling menghormati sesama sehingga misi rahmatan lil 'alamin dapat diwujudkan secara konkret dalam tata hubungan internasional.¹⁰⁵

IL.1.4. Visi dan Misi

Pandangan-pandangan visioner Partai Keadilan tertuang dalam visi yang dimilikinya antara lain pertama, menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa. Kedua, menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional. Ketiga, menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia. Keempat, menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Kelima, menjadi akselerator bagi wujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Untuk mewujudkan pandangan-pandangan visioner di atas Partai Keadilan melakukan beberapa langkah penting yang tercakup dalam misinya : Pertama, berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Kedua, menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia. Ketiga, berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang

¹⁰⁵ Ibid, hal. 39-51

berbangsa dan bernegara. Kelima, ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban dunia.¹⁰⁶

II.1.5. Agenda Nasional PK

Partai Keadilan kemudian menetapkan 14 agenda nasional yang dipandang sangat penting untuk dilakukan. *Pertama*, bidang umum. Dalam bidang umum, PKS mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut, (1) membangun watak bangsa (*character building*) sebagai modal utama nasional melalui kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar guna mengokohkan kepribadian para anak bangsa dengan menggali dan menghayati kembali nilai-nilai religius yang telah lama bersemayam di dalam hati mereka. (2) menempatkan ulama, cendekiawandan aparat pemerintahan dalam sebuah sistem negara kesatuan yang kokoh, sehingga terjalin sebuah kerja sama dalam membangun kehidupan bangsa. (3) mewujudkan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui akurasi perencanaan, pengokohan perundang-undangam dan kelembagaan pengawasan pembangunan yang independen. (4) mewujudkan keterpaduan strategi pembangunan pada seluruh bidang sehingga menghasilkan kesatuan program dalam pelaksanaan pembangunan. Menjadikan bidang tertentu sebagai panglima dan simbol kesuksesan mengakibatkan pembangunan pada masa lalu dipenuhi ketimpangan dan pembiasaan. (5) Reorientasi terhadap struktur dan pentahapan pembangunan Indonesia masa depan dalam upaya membangkitkan kembali potensi bangsa di atas puing kehancuran ekonomi, politik dan sosial Orde Baru.

¹⁰⁶ Ibid. hal. 46-51

Kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi PKS mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut, (1) mengembangkan sistem ekonomi moral yang berlandaskan pada silai-nilai transendental sebagai sar pertimbangan etik, konseptual dan operasional dalam seluruh kegiatan ekonomi yang berkeadilan. (2) mengokohkan kebijakan afirmasi dalam ekonomi yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat "kecil" tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama agar tercapah persamaan dalam mendapatkan peluang ekonomi bagi seluruh pihak. (3) mengembangkan dan memperkuat sistem keuangan bagi hasil sehingga mampu menjadi alternatif bagi sestem ekonomi yang sudah berlangsung. (4) meberdayakan UKM dan koperasi melalui penghapusan segala hambatan usaha dan mendorong faktor-faktor dinamis yang dimilikinya. Perlakuan diskriminatif yang mengutamakan usaha besar dengan berbagai proteksi, fasilitas khusus dan berbagai kebijakan distorsif harus dihilangkan. (5) menurunkan pengangguran dan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja. (6) menegaskan hak-hak buruh dan menempatkannya sebagai aset nasional dan mitra pengusaha. (7) menggairahkan sektor pertanian melalui pemberdayaan petani dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mencapai swasembada pangan. (8) meningkatkan sensitifitas pemberian subsidi dalam penyediaan pelayanan sosial dengan menjauhkannya dari praktek korupsi dan kolusi. (9) menyeimbangkan antara sektor riel dengan sektor moneter sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menjadi semu, tetapi berjalan secara matap. (10) mengembanngkan dan memperkuat sektor agribisnis dan agroindustri sebagai andalan bagi pembangunan ekonomi. (11) mewujutkan pertumbuhan yang dinamis dengan ditopang oleh kepercayaan

nasional maupun internasional sehingga modal dan investasi asing dapat masuk secara langsung kepada lembaga-lembaga usaha. (12) memaksimalkan otonomi daerah melalui peningkatan partisipasi perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pembangunan sehingga mampu meningkatkan efektivitas peran pemerintah daerah. (13) mengokohkan peran negara dalam pembangunan ekonomi melalui dukungan kepercayaan rakyat dan internasional yang dimunculkan dari pemerintahan yang efisien, bersih dan transparan. (14) meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kebijakan makro yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan.

Ketiga, bidang politik. Pentingnya permasalahan politik membuat PKS bertekad untuk mewujudkan hal-hal berikut, (1) menegakkan keadilan di seluruh tingkatan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, aparata keamanan, tokoh masyarakat, serta negara, dan menjadikannya sebagai dasar demokrasi dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. (2) memperkuat pilar-pilar kesatuan nasional dengan menegakkan setiap gerakan yang dapat menimbulkan separatisme dan membangun kesadaran bahwa kesatuan nasional adalah sumber stabilitas dan keamanan bangsa. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sarana media massa, budaya dan pendidikan. (3) membangun rasa tanggung jawab rakyat untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemimpinnya sebagai salah satu perwujudan masyarakat madani. (4) mengembangkan iklim transparansi dalam penyelenggaraan negara dan mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. (5) mewujudkan fungsi –fungsi kelembagaan negara dengan meningkatkan kemandirian lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif melalui penrapan perundang-

undangan dan penempatan aparat yang bersih. Membangun proses demokratisasi politik yang bersih dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa diwarnai berbagai bentuk intimidasi baik dari pihak pemerintah, aparat keamanan ataupun partai politik peserta pemilu ini sendiri. (6) kesatuan nasional menuntut ABRI yang kuat, oleh karena itu profesionalisme ABRI perlu ditegakkan.

Keempat, bidang hukum. Dalam mewujudkan hukum yang bermartabat, PKS mengupayakan beberapa hal berikut, (1). menegakkan supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) mengarahkan keberpihakan hukum dan prkatek hukum pada yang lemah, sehingga dirasakan adanya rasa keadilan dan menghindarkannya dari jebakan orientasi sesaat baik atas nama stabilitas politik maupun pertumbuhan ekonomi. (3) mengakhiri keragu-raguan dalam pemilihan kepribadian hukum-hukum Indonesia. Upaya untuk memaksakan hukum-hukum barata telah menyebabkan hukum terlepas dari akar filosofis, sosiologis dan historis masyarakatnya.

Kelima, bidang pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa menjadikan PKS bertekad untuk mengajukan langkah-langkah penting berikut. (1) melakukan re-orientasi pendidikan nasional menuju sistem pendidikan terpadu, dan memperluas penyelenggaraan wajib belajar pendidikan melalui peningkatan status hukum, mobilisasi fasilitas fisik dan sukarelawan pendidikan, serta meningkatkan motivasi pendidikan di kalangan masyarakat. (2) meningkatkan tindakan afirmasi yang menyangkut profesionalitas, integritas dan penghargaan

dalam rangka mengembalikan peran guru sebagai anasir kunci dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. (3) meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga mencapai taraf seimbang dengan kebutuhan pemecahan problema sumberdaya manusia dalam pembangunan Indonesia masa depan. (4) mewujudkan wibawa pendidikan nasional melalui evaluasi berkesinambungan terhadap aspek konseptual dan operasional sistem pendidikan nasional dalam berbagai jenis, jalur dan jenjang dalam rangka menggali potensi bangsa dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang makin mengglobal. (5) mengokohkan peran pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam segenap aspek kehidupannya. Upaya ini mencerminkan kesungguhan menempatkan pendidikan sebagai tulang punggung pencapaian masa depan Indonesia yang beradab.

Keenam, bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, PKS berupaya (1) mengokohkan peran iptek dan sumber daya manusia sebagai inti bagi pengembangan ekonomi nasional yang berbasis sektor riil. (2) mengintegrasikan secara holistik upaya pengembangan iptek dalam proses industrialisasi baik dalam industri besar, menengah maupun kecil. (3) mengarahkan penguasaan dan pendalaman iptek serta pembangunan tekno-struktur (humanware, orgaware, technoware dan infoware) nasional kepada bidang-bidang yang dianggap strategis (memiliki dampak ekonomi yang tinggi) dalam industri nasional baik jangka pendek maupun panjang. (4) melenyapkan upaya untuk menjadikan iptek sebagai perpanjangan supremasi nasional yang membebani anggaran negara sehingga cenderung mengabaikan sisi rasionalitas dan

dasar mamfaat. (5) menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi iptek, sehingga iptek menjadi rahmat bagi manusia. (6) mendorong upaya-upaya pengembangan budaya iptek dalam rangka menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap iptek.

Ketujuh, bidang Lingkungan Hidup. Dalam rangka melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup secara optimal, PKS bertekad, (1) mengokohkan upaya pembangunan berkelanjutan sebagai manifestasi kearifan dan keadilan manusia terhadap lingkungan hidup mereka. Pembangunan harus dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan ekologi serta kelestarian sumberdaya alam sehingga pemeuhan hak-hak kesejahteraan manusia yang hidup di hari ini tidak dilakukan dengan merampas hak-hak generasi mendatang. (2) bersama masyarakat mendorong upaya-upaya yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran dan konservasi lingkungan serta melindungi keragaman hayati baik flora maupun fauna dari pencurian dan pemusnahan oleh semua pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kedelapan, bidang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang kokoh dalam konteks otonomi daerah, PKS berupaya untuk (1) mengokohkan usaha-usaha perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju sistem manajemen nasional yang terdesentralisasi dengan tetap menjaga pilar-pilar kesatuan nasional. (2) mewjutkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa khususnya dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. (3) menjamin

keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan negara sehingga tidak dianaktirikan mereka yang bekerja keras bagi kemakmuran negara dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. (4) merealisasikan redistribusi kekayaan alam dan kemampuan yang dimilikinya secara proporsional dan transparan dengan mempertimbangkan aspek kondisi lokal dan kesatuan nasional. (5) memberlakukan undang-undang lingkungan hidup untuk memelihara aset daerah dari eksploitasi alam yang merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kesembilan, bidang Kepemudaan. Pentingnya pemuda sebagai pewaris bangsa, maka PKS berupaya untuk, (1) mewujudkan keberdayaan dan kemandirian pemuda dengan mengoptimalkan potensi, kebijakan, dan budget yang mendukung serta pengarahannya pendidikan yang selaras. (2) memunculkan kepeloporan pemuda sehingga tumbuh sikap pro aktif dan partisipatif dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa serta memiliki keberpihakan pada kebesaran dan keadilan. (3) membuka kesempatan bagi kemunculan kepemimpinan nasional dari kalangan pemuda yang berada pada puncak inovasi dan kreativitasnya

Kesepuluh, bidang Seni Budaya. Demi mewujudkan seni budaya yang bermartabat, PKS berupaya untuk (1) menumbuhkan profesionalitas seniman dan budayawan yang mengandung nilai-nilai luhur, sehingga mampu menghasilkan karya seni yang bernilai luhur dan memiliki keunggulan di tingkat internasional melalui program pendidikan, pelatihan dan penyediaan sarana pendukung. (2) mengoptimalkan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengontrol terhadap karya seni budaya sehingga karya tersebut dapat berfungsi sebagai media

pencerminan dari pembentukan kepribadian bangsa. (4) Menyeleksi masuknya berbagai karya seni budaya asing sehingga bangsa terhindar dari misi-misi destruktif yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

Kesebelas, bidang Penerangan. Untuk mewujudkan pers yang bertanggung jawab, PKS mewujudkan langkah-langkah berikut, (1) Mengokohkan kebebasan pers yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesatuan nasional, kepribadian serta masa depan bangsa. (2) Menumbuhkan sensitivitas kalangan pers untuk melakukan pemilihan terhadap materi yang dipublikasikan. (3) Menumbuhkan peristiwa dan berita secara objektif dan bertanggung jawab. (4) Menjauhkan sikap media massa berbentuk aliran (subjektif) yang dapat menyebabkan kesalahan informasi.

Keduabelas, bidang Kewanitaan. Memahami persamaan hak bagi wanita, maka PKS (1) menempatkan pemberdayaan wanita Indonesia ke dalam konteks perwujudan masyarakat madani melalui perguliran model-model keluarga madani, yaitu keluarga yang mandiri, bahagia, sejahtera, dan kepedulian sosial. (2) memposisikan peran wanita sebagai subjek pembangunan dalam suatu wacana keadilan baru yang bertata nilai sesuai dengan mendorong setiap usaha meningkatkan peran-peran wanita dalam pendidikan, memperluas jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengayoman hukum. (3) mengokohkan peran penting wanita dalam menentukan kualitas moral bangsa dalam kaitan pendidikan generasi baru dan pengembangan kepribadian kewanitaan.

Ketigabelas, bidang Kesehatan. (1) mengupayakan agar aspek kebijakan dan strategi kesehatan senantiasa harus ditujukan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, pemerataan, efisiensi, dan kesinambungan. (2) mengupayakan desentralisasi kebijakan operasional administratif dan manajemen. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan yang proaktif terhadap permasalahan kesehatan, memiliki otoritas, serta mengutamakan konsolidasi dengan lembaga-lembaga lainnya. (3) mengupayakan terwujudnya perubahan paradigma orientasi pemeliharaan kesehatan dari kuratif ke arah promotif dan preventif bagi seluruh lapisan masyarakat. (4) mengupayakan agar pembinaan sumberdaya manusia selalu diarahkan kepada : a. Upaya merekrut dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas; b. Peningkatan profesionalisme dan mentalitas; c. Pemerataan penyebaran sesuai dengan kondisi obyektif kebutuhan di lapangan; (5) mengupayakan agar perluasan dan peningkatan kualitas industri kesehatan dioreintasikan ke hulu untuk menciptakan bahan baku dan alat kesehatan, dengan mengutamakan pada kemandirian, pengawasan, efisiensi, sesuai dengan keperluan dalam bidang pembangunan kesehatan.

Keempatbelas. Bidang Sosial. Dalam mewujudkan tatanan masyarakat sosial, PKS berupaya untuk (1) Membangun sistem sosial yang terbingkai dalam kerangka nilai-nilai keadilan. (2) Membangun sistem sosial yang proaktif dalam menyehatkan dan mensejahterakan dirinya, serta mampu mengantisipasi diri sendiri dari pengaruh negatif hasil-hasil pembangunan dan sebagai sistem kontrol sosial terhadap pemerintah guna mewujudkan keadilan di tengah-tengah

masyarakat.(3) Menjadikan masyarakat sebagai aktor sosial utama dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab pemerintah. (4) Menumbuhkan lembaga-lembaga masyarakat untuk memacu kemandirian dan mewujudkan desentralisasi.¹⁰⁷

II.2. Profil PKS

II.2.1. Latar Belakang Berdirinya

Dalam Piagam Deklarasi PKS yang dibacakan di Jakarta pada 20 April 2002 di hadapan puluhan ribu massa disebutkan bahwa Reformasi Nasional yang bergulir sejak tanggal 21 Mei 1998 pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad. Sedangkan demokratisasi dipandang sebagai tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya.

Bertolak dari kesadaran tersebut, maka para aktivis dakwah tersebut kemudian membentuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diharapkan akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya.

¹⁰⁷ Ibid, hal. 93-102

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Piagam Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Drs. Almuzzammil Yusuf selaku Ketua Umum dan Drs. Haryo Setyoko sebagai Sekretaris Jenderal. Selain itu terdapat 50 tokoh pendiri di belakang pembentukan PKS adalah :

1. Abdullah
2. Achyar Eldine, SE
3. Ahmad Yani, Drs.
4. Ahmadi Sukarno, Lc., Mag
5. Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR
6. Ali Akhmadi, MA
7. Arlin Salim, Ir
8. Bali Pranowo, Drs
9. Budi Setiadi, SKH
10. Bukhori Yusuf, MA
11. Eddy Zanur, Ir, MSAE
12. Eman Sukirman, SE
13. Ferry Noor, Ssi
14. H. Abdul Jabbar Madjid MA
15. H.M Ridwan
16. H.M. Nasir Zein, MA
17. Harjani Hefni, Lc
18. Haryo Setyoko, Drs
19. Herawati Noor, Dra
20. Herlini Amran, MA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

21. Imron Zabidi, Mphil
22. Kaliman Iman Sasmitha
23. M. Iskan Qolba Lubis, MA
24. M. Martri Agoeng
25. Muttaqin
26. Mahfudz Abdurrahman
27. Martarizal, DR
28. Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR¹⁰⁸
29. Muhammad Aniq S, Lc.
30. Muhammad Budi Setiawan, Drs
31. Muslim Abdullah, MA
32. Musoli, MSc, Drs
33. Musyafa Ahmad Rahim, Lc
34. Nizamuddin Hasan, Lc
35. P. Edy Kuncoro, SE. Ak
36. Ruly Tisnayuliansyah, Ir
37. Rusdi Muchtar
38. Sarah Handayani, SKM
39. Susanti
40. Suswono, Ir
41. Syamsu Hilal, Ir
42. Umar Salim Basalamah, SIP

¹⁰⁸ www.pk-sejahtera.or.id

43. Usman Effendi, Drs
44. Wahidah R Bulan, Dra
45. Wirianingsih, Dra
46. Yon Mahmudi, MA
47. Yusuf Dardiri, Ir
48. Zaenal Arifin
49. Zufar Bawazier, Lc
50. Zulkieflimansyah, DR.¹⁰⁹

II.2.2. Visi dan Misi

Visi umum Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. Selain memiliki visi umum, PKS memiliki visi khusus yaitu : partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani..

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai : (1) Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. (3) Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil `alamin. (4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

¹⁰⁹ Ibid

Dengan berpedoman pada visi di atas, PKS menentukan tujuh misi, antara lain: (1) Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. (2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. (3) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. (4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. (5) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. (6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi. (7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Dalam Anggaran Dasar Pasal 5 tentang tujuan, PKS menetapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah *Partai Da'wah* yang bertujuan mewujudkan *masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.*

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, di pasal 6 tentang usaha, PKS mengusahakan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. *Kedua*, Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami. *Ketiga*, Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu

menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang. *Keempat*, Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan *kelima*, Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa. ¹¹⁰

II.2.3. Prinsip Dasar Hubungan dan Koalisi Partai

Dalam AD Pasal 25, PKS menjelaskan beberapa prinsip dasar dalam Hubungan dan Koalisi Partai yaitu, *pertama*, ummat Islam Indonesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia. *Kedua*, untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri. *Ketiga*, majelis Syuro adalah lembaga yang berwenang memutuskan koalisi partai dengan partai atau organisasi lain. Yang kemudian dijelaskan lagi dalam ART Pasal 34 tentang Asas Hubungan Keorganisasian. *Pertama*, hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun. *Kedua*, hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun. *Ketiga*, hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum yang dibenarkan Islam. ¹¹¹

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

II.2.4. Prinsip Kebijakan

Sebagai partai dakwah yang terorganisir rapi PKS menetapkan perinsip-prinsip kebijakan yang mencerminkan watak da'wah yang diembannya sekaligus menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya. Prinsip pertama, *Al-Syumuliyah* (Lengkap dan Integral). Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

Prinsip kedua, *Al-Ishlah* (Reformatif). Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

Prinsip ketiga, *Al-Syar'iyah* (Konstitusional). Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan komprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta

mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasikan amanah dan melawan kedhaliman.

Prinsip keempat, *Al-Wasathiyah* (Moderat). Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (*wasathiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan $\frac{1}{2}$ amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri' $\frac{1}{2}$ iyah (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

Prinsip kelima, *Al-Istiqamah* (Komit dan Konsisten). Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum

transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawaniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

Prinsip keenam, *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (Tumbuh dan Berkembang). Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

Prinsip ketujuh, *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (Bertahap, Seimbang dan Proporsional). Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahanan dan keseimbangan. Kebertahanan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (*tadarruj dan tawazun*) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

Prinsip kedelapan, *Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah* (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan). Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip *al-awlawiyat* dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip *al-awlawiyat* dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya *mashlahah ummah* menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan

operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

Prinsip kesembilan, *Al Hulul (Solusi)*. Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

Prinsip kesepuluh, *Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)*. Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu

tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

Prinsip kesepuluh, *Al-'Alamiyah* (Bagian dari da'wah sedunia). Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat 'alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah 'alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat 'alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.¹¹²

II.2.5. Kebijakan Dasar

Kebijakan Dasar Partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi Umum. Kebijakan Umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya, IPTEK dan Hukum. Sementara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hal yaitu Kebijakan Internal dan Eksternal .

¹¹² Ibid

A. Kebijakan Umum :

Pertama, aspek ideologi. Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai. (1) Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. (2) Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT ; pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam ; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup. (3) Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip . Pertama, kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam; kedua, otoritas syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan al Sunnah, dan ijtihad; ketiga, kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

Kedua, aspek Politik. Dalam hal pembangunan sistem. PKS akan memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Sedangkan dalam pembangunan komunikasi politik, PKS memandang komunikasi politik sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar

yang dapat dijadikan *guidance* para aktivis dalam komunikasi politik. *Pertama*, penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara. *Kedua*, Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan masyarakat

Mengenai pembangunan budaya politik, PKS akan melakukan langkah-langkah berikut: (1) Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik. (2) Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik. (3) Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik. (4) Mengembangkan budaya hisbah.

Dalam hal pembangunan partisipasi politik, PKS mengusahakan beberapa langkah sebagai berikut : *pertama*, penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela. *Kedua*, mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas.

Dalam hubungan eksternal PKS menjadikan pola *ta'awun 'alal birri wat taqwa* (bekerja sama dalam merealisasikan kebajikan dan taqwa), dan tidak *ta'wun 'alal ismi wal 'udwan* (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) sebagai prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum berikut: *Pertama*, bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di

dalam ataupun di luar negeri. *Kedua*, aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam. *Ketiga*, Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam *Keempat*, bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.

Berkaitan dengan Pemilu 2004, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2004 yang diperkirakan skala persaingan antarpartai politik semakin luas dan diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum sebagai berikut : (1) Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera. (2) Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera. (3) Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. (4) Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengaktifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial. (5) Memperkuat struktur dan SDM di Dati II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik. (6) Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.

Ketiga, Aspek Birokrasi. PKS berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini : Pertama :

kebobrokan di semua sektor. Kedua : menjadi sarang KKN, dan Ketiga : tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu PKS memandang perlu dilakukannya reformasi untuk memunculkan *clean government*. Sebagai konsekuensinya perlu Partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan *ishlah al-hukumah* (perbaikan pemerintahan, pen) dengan kebijakan: (1) Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah. (2) Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan. (3) Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat. (4) Melakukan kontrol secara aktif.

Keempat, aspek ekonomi dan kesejahteraan. Kemandirian dalam memenuhi kedua *cost* dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut PKS memandang perlu melakukan langkah-langkah strategis dan konkret berikut. *Pertama*, menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi. *Kedua*, membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat. *Ketiga*, memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam. *Keempat*, tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke

tangan musuh-musuh ummat. *Kelima*, menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak. *Keenam*, memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

Kelima, aspek sosial budaya. Dalam rangka mengantisipasi sedini mungkin setidak-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam seperti pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagamaan bagi sebagian besar masyarakat muslim, PKS menetapkan kebijakan umum berikut: *Pertama*, membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin. *Kedua*, mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian. *Ketiga*, aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak.

Keenam, aspek IPTEK dan industri. Untuk mewujudkan kemajuan materi dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mencapai kebahagiaan hakiki, maka PKS menetapkan sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia. (1) Penguasaan bidang IPTEK dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia. (2) Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pengembangan dan aplikasi IPTEK, sehingga menjadi rahmat bagi manusia. (3) Mengembangkan IPTEK terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM umat. (4) Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi umat dan bangsa.

Ketujuh, aspek peran dan tugas wanita. PKS memandang bahwa tugas memakmurkan bumi (*istikhlaf*) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip 'kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidaknya-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu PKS memandang perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik. (1) Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya. (2) Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah. (3) Keseimbangan hak pemberdayaan politik. (4) Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. (5) Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat. (6) Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.

Kedelapan, aspek hukum. PKS menyadari bahwa sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap

orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka PKS memandang perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut : (1) Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat. (2) Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional. (3) Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya. (4) Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

Kesembilan, aspek pendidikan. PKS menganggap pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya. Oleh karena itu, PKS menetapkan beberapa langkah : (1) Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidikan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil. (2) Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan. (3) Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.

B. Strategi Umum :

Dengan memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini, PKS memandang diperlukannya suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu PKS menetapkan strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal :

Pertama, konsolidasi internal. Dalam konsolidasi internal terdiri empat sasaran. (1) Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan yang diwujudkan dengan mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan; mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan; menguatkan ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader; mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah. (2) Konsolidasi internal dengan sasaran pengembangan syi'ar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik yang diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi; meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuatan yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya; mengembangkan kemampuan pertahanan diri pada setiap kader; mengintensifkan ta'amul ijtima'i dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial. (3) Konsolidasi internal untuk menata perubahan yang

diwujudkan dengan menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wahnya; meningkatkan penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelolaannya; meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda da'wah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRa sebagai ujung tombak ekspansi da'wah di daerahnya. Dan (4) Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan SDM yang diwujudkan dengan melakukan reorganisasi partai yang disesuaikan dengan tantangan ke depan; membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah; mengalokasikan secara proporsional potensi SDM Partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan; menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan.

Kedua, Ekspansi Eksternal. Dalam ekspansi eksternal, PKS membaginya berdasarkan tujuannya menjadi empat. (1) Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan sosial yang diusahakan dengan memperluas wilayah-wilayah jangkauan da'wah secara geografis dan demografis; mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola; memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi. (2) Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis social yang diusahakan dengan menata personil da'wah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis; mengembangkan lembaga pendidikan Islam; meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembaga.

organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah. (3) Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum yang diusahakan dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak; memberdayakan dan mengembangkan media massa internal; mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam; menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis. (4) Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik yang diusahakan dengan menguatkan dukungan sosial dan politik; optimalisasi peran dan publikasi misi kerja SDM yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi; mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah; mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan; melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan; membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia; mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.¹¹³

¹¹³ *ibid*